



RENCANA STRATEGIS

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**



Tahun 2025-2029

Jl. Soekarno - Hatta No 2-4, Wonosobo

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO	7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah	12
2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah	17
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah	24
2.5. Mitra Sekretariat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	26
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah	27
2.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah	27
2.8. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	29
2.9. Isu Strategis Sekretariat Daerah	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO	34
3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	35
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB V PENUTUP	85

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 dapat tersusun sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan mengacu pada Perda Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025- 2029.


Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan seluruh kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029.

Sekretariat Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Rencana Strategis Sekretariat Daerah merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, bersifat indikatif dengan mempertimbangkan kesinambungan, dan berkelanjutan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan serta melanjutkan kegiatan-kegiatan penting dan relevan yang belum terlaksana.

Merupakan harapan dan semangat bersama agar Rensta Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan optimal dalam rangka berkontribusi secara nyata turut serta dalam **"Mewujudkan Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur"**.

Wonosobo, 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO


Drs. ONE ANDANG WARDOYO, MSI

Pembina Utama Madya

NIP. 196809251988031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 272 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029 yang telah disusun merupakan pedoman seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun di wilayah Kabupaten Wonosobo yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Wonosobo dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo 2025-2029. RPJMD Kabupaten Wonosobo 2025-2029 tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya menurut pasal 272 ayat 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis mempunyai arti yang sangat penting dalam proses pembangunan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang sebagai konsekuensi dari apa yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan dan strategi berupa kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun harus mengacu pada RPJMD sebagai bagian dari penjabaran secara teknis dari dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dan saling terkait satu sama lain serta saling menunjang. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan seperti halnya RPJMD, selain Undang-Undang tersebut di atas, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini juga memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan

yaitu melaksanakan tugas membantu Bupati Wonosobo dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah selain sebagai wujud penjabaran dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka dokumen Rencana Strategis sangat penting bagi organisasi perangkat daerah terlebih Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dokumen perencanaan yang bersifat lima tahunan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan adanya dokumen Rencana Strategis, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan dapat terukur, terarah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 - 2029;
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan, pedoman, acuan dan landasan bagi aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka turut mewujudkan visi dan misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo disertai dengan indikator kinerja, target dan pagu anggaran indikatif untuk kurun waktu 2025- 2029;
- c. Menciptakan mekanisme pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025-2029 untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang;
- d. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel guna mendorong penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
- 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.5 Mitra Sekretariat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah
- 2.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah
- 2.8 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.9 Isu Strategis Sekretariat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

- 3.1 Tujuan Sekretariat Daerah
- 3.2 Sasaran Sekretariat Daerah
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan yang telah diuraikan sebelumnya, pada bagian ini dijelaskan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, gambaran pelayanan yang diselenggarakan, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

1. Perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah;
3. Penyelenggaraan kebijakan Daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
7. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

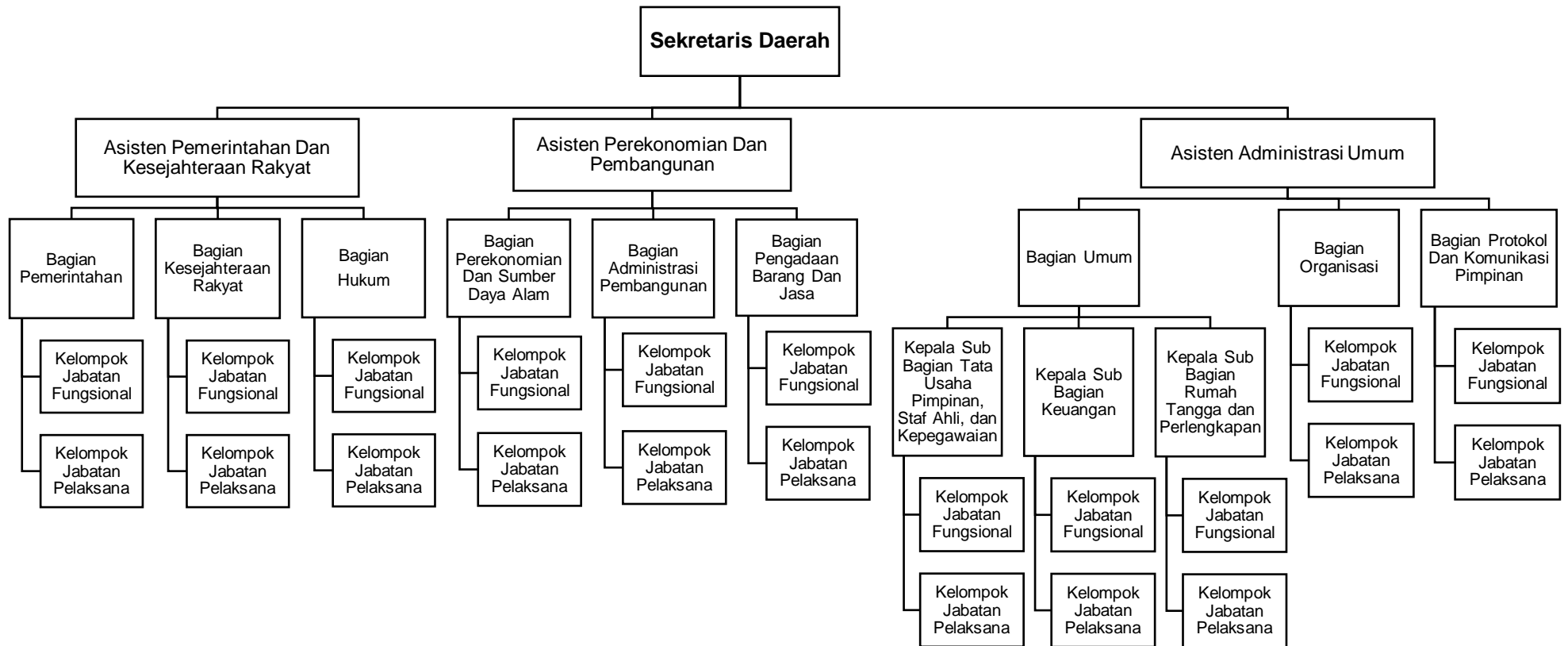
Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

1. SEKRETARIS DAERAH
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - a. Bagian Pemerintahan (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - c. Bagian Hukum (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana
3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana
4. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
- a. Bagian Umum (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 5) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - b. Bagian Organisasi (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Kelompok Jabatan Pelaksana
 - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (dipimpin oleh Kepala Bagian) terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Protokol
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - 3) Kelompok Jabatan Pelaksana

Berikut ini bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo:

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

c. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, perekonomian, dan

sumber daya alam.

b. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan.

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:

a. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

b. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah

di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi PNS dan PPPK yang merupakan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai peran sangat vital dalam upaya pencapaian kinerja organisasi. Susunan ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sampai dengan bulan Juni 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 1

Daftar PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
Menurut Pangkat, Golongan Ruang, dan Jenis Kelamin

NO	PANGKAT	GOL/ RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
			L	P		
1	Pembina Utama Madya	IV / d	1	0	1	0,93
2	Pembina Utama Muda	IV / c	4	0	4	3,7
3	Pembina Tingkat I	IV / b	7	3	10	9,27
4	Pembina	IV / a	2	1	3	2,78
5	Penata Tingkat I	III / d	4	5	9	8,33
6	Penata	III / c	7	2	9	8,33
7	Penata Muda Tingkat I	III / b	5	7	12	11,11
8	Penata Muda	III / a	15	15	30	27,78
9	Pengatur Tingkat I	II / d	7	2	9	8,33
10	Pengatur	II / c	11	2	13	12,04
11	Pengatur Muda Tingkat I	II / b	4	0	4	3,7
12	Pengatur Muda	II / a	2	0	2	1,85
13	Juru Tingkat I	I / d	2	0	2	1,85
Jumlah			71	37	108	100

Sumber: Sekretariat Daerah (Juni 2025)

Berdasarkan tabel II.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sampai bulan Juni 2025 sejumlah 108 orang, terdiri dari 71 orang Laki-laki dan 37 orang Perempuan dengan rincian golongan IV/d sejumlah 1 orang atau 0,93%, golongan IV/c 4 orang atau 3,7%, golongan IV/b 10 orang atau 9,27%, golongan IV/a 3 orang atau 2,78%, golongan III/d 9 orang atau

8,33%, golongan III/c 9 orang atau 8,33%, golongan III/b 12 orang atau 11,11%, golongan III/a 30 orang atau 27,78%, golongan II/d 9 orang atau 8,33%, golongan II/c 13 orang atau 12,04%, golongan II/b 4 orang atau 3,7%, golongan II/a dan I/d masing-masing 2 orang atau masing-masing 1,85%.

Tabel II.2

Daftar PPPK Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN/RUANG	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	IX	17	14	31	77,5
2	VII	1	2	3	7,5
3	V	5	1	6	15
Jumlah		23	17	40	100

Sumber: Sekretariat Daerah (Juni 2025)

Berdasarkan tabel II.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah PPPK di Sekretariat Daerah Wonosobo sampai bulan Juni 2025 sejumlah 40 orang, terdiri dari Laki-laki sebanyak 23 orang dan Perempuan sebanyak 17 orang dengan rincian golongan IX terdiri 17 Laki-laki dan 14 Perempuan, golongan VII terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan, dan golongan V terdiri dari 5 Laki-laki dan 1 perempuan.

Sedangkan daftar nominatif ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut.

Tabel II. 3

Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		L	P		
1	S-2	13	4	17	11,49
2	S-1 / D-IV	43	38	81	54,73
3	D-III	6	7	13	8,78
4	SLTA / SEDERAJAT	23	6	29	19,59
5	SLTP / SEDERAJAT	6	0	6	4,05
6	SD	2	0	2	1,35
Jumlah		93	55	148	100

Sumber: Sekretariat Daerah (Juni 2025)

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah, jumlah ASN lulusan S-2 sebanyak 17 orang (11,49%), jumlah lulusan S-1/D-IV sebanyak 81 orang (54,73%), jumlah lulusan D-III sebanyak 13 orang (8,78%), jumlah lulusan SLTA/Sederajat sebanyak 29 orang (19,59%), jumlah lulusan SLTP

Sederajat sebanyak 6 orang (4,05%), dan jumlah lulusan SD sebanyak 2 orang (1,35%).

Tabel II.4

Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan Jabatan Fungsional

Fungsional	L	P	Jumlah	%
Analisis Kebijakan	7	12	19	31,15
Perancang Peraturan Perundang-Undangan	2	1	3	4,91
Analisis Hukum	1	0	1	1,63
Arsiparis	0	2	2	3,28
Pengelolaan Pengadaan PBJ	16	5	21	34,43
Pranata Komputer	4	1	5	8,2
Analisis SDMA	0	4	4	6,56
Pranata Humas	3	1	4	6,56
Penyusun Materi Hukum dan Undang-Undang	2	0	2	3,28
Jumlah	35	26	61	100

Sumber : Sekretariat Daerah (Juni 2025)

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan jabatannya terdiri dari jabatan managerial dan non managerial. Kelompok jabatan managerial meliputi Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Kepala Bagian, dan eselon IV. Sedangkan jabatan non managerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pada tabel II.4 di atas dapat dilihat bahwa jabatan fungsional yang ada di Sekretariat Daerah berjumlah 61 orang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Adapun kriteria jabatan fungsional meliputi Analisis Kebijakan sejumlah 19 orang atau 31,15%, Perancang Peraturan Perundang-Undangan sejumlah 3 orang atau 4,91%, Analisis Hukum sejumlah 1 orang atau 1,63%, Arsiparis sejumlah 2 orang atau 3,28%, Pengelolaan Pengadaan PBJ sejumlah 21 orang atau 34,43%, Pranata Komputer sejumlah 5 orang atau 8,2%, Analisis SDMA sejumlah 4 orang atau 6,56%, Pranata Humas sejumlah 4 orang atau 6,56%, dan Penyusun Materi Hukum dan Undang-Undang sejumlah 2 orang atau 3,28%.

Tabel II. 5

Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
Berdasarkan Jabatan Pelaksana

Pelaksana	L	P	Jumlah	%
Penata Layanan Operasional	0	2	2	2,81
Penelaah Teknis Kebijakan	8	9	17	23,94
Pengadministrasi Perkantoran	16	7	23	32,39
Penata Kelola Hukum dan Undang-Undang	0	1	1	1,41
Penata Kelola Pemerintahan	0	4	4	5,63
Penata Keprotokolan	0	2	2	2,82
Operator Layanan Operasional	15	0	15	21,13
Fasilitator Pemerintahan	0	1	1	1,41
Pengolah Data dan Informasi	3	0	3	4,23
Pengelola Keprotokolan	0	2	2	2,82
Pengelola Layanan Operasional	1	0	1	1,41
Jumlah	43	28	71	100

Sumber : Sekretariat Daerah (Juni 2025)

Pada tabel II.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah jabatan pelaksana yang ada di Sekretariat Daerah berjumlah 71 orang terdiri dari 43 laki-laki dan 28 perempuan. Adapun untuk kriteria jabatan pelaksana meliputi Penata Layanan Operasional sejumlah 2 orang atau 2,81%, Penelaah Teknis Kebijakan sejumlah 17 orang atau 23,94%, Pengadministrasi Perkantoran sejumlah 23 orang atau 32,39%, Penata Kelola Hukum dan Undang-Undang sejumlah 1 orang atau 1,41%, Penata Kelola Pemerintahan sejumlah 4 orang atau 5,63%, Penata Keprotokolan sejumlah 2 orang atau 2,82%, Operator Layanan Operasional sejumlah 15 orang atau 21,13%, Fasilitator Pemerintahan sejumlah 1 orang atau 1,41%, Pengolah Data dan Informasi sejumlah 3 orang atau 4,23%, Pengelola Keprotokolan sejumlah 2 orang atau 2,82% dan Pengelola Layanan Operasional sejumlah 1 orang atau 1,41%.

Tabel II. 6

Daftar Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Pendidikan	L	P	Jumlah	%
S-1	4	3	7	63,64
SLTA / SEDERAJAT	3	1	4	36,36
Jumlah	7	4	11	100

Sumber : Sekretariat Daerah (Juni 2025)

Berdasarkan tabel II.6 di atas dapat dilihat bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo masih terdapat Non ASN sejumlah 11 orang dengan pendidikan S-1 sejumlah 7 orang terdiri dari 4 laki-laki dan 3 perempuan, sementara yang berpendidikan SLTA 4 orang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki sarana prasarana berupa aset dengan kondisi sampai dengan bulan Juni 2025 sebagai berikut:

Tabel II. 7

Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1	Gedung/Bangunan	33	Baik
2	Ruang rapat/pertemuan	9	Baik
3	Sarana mobilitas roda empat	46	Baik
4	Sarana mobilitas roda dua	58	Baik
5	Komputer	77	Baik
6	Laptop	65	Baik
7	Printer	58	Baik

Sumber : Sekretariat Daerah (Juni 2025)

Secara umum seluruh sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik. Hal ini diukur melalui tingkat kualitas dan penggunaan/pemanfaatan yang rata-rata ada di angka 80%. Sehingga selain kebutuhan dalam pemenuhan/pengadaan aset-aset pendukung kinerja tersebut, juga diperlukan upaya pemeliharaan yang baik agar penggunaan anggaran dalam kebutuhan sarana dan prasarana kantor memenuhi prinsip efisiensi.

Kebijakan pendanaan terhadap kebutuhan anggaran dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor ini berupa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

2.3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target 2026	Realisasi Akhir
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian				
1	Nilai SAKIP	Angka	NA	NA	NA	66,00	65,76	65,76	66,42	66,42	68,64	67,04	72,47	67,04
	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	%	NA	NA	NA	NA	100,00	70,00	100,00	96,43	100,00	100,00	100,00	100,00%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%	NA	NA	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%	NA	NA	NA	NA	100,00	100,00	100,00	77,01	100,00	88,24	100,00	88,24%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%	NA	NA	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target 2026	Realisasi Akhir
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	%	NA	NA	NA	NA	100,00	70,00	100,00	70,00	100,00	70,00	10,000	70,00%
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	%	NA	NA	NA	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan	Angka	NA	NA	NA	NA	80,00	83,72	80,00	92,12	85,00	96,22	90,00	100,00
	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	Angka	NA	NA	65,00	70,80	68,00	70,80	70,00	70,80	71,00	70,80	73,00	70,80
2	Indeks Tata Kelola PBJ	%	NA	NA	NA	NA	70,00	33,50	85,00	69,70	90,00	84,95	95,00	84,95%
	Level Kematangan UKPBJ	Angka	NA	NA	NA	NA	1,00	1,00	88,00	69,70	100,00	84,95	100,00	100,00
	Nilai kematangan organisasi daerah (KOD)	Angka	NA	NA	36,00	35,58	37,00	36,03	38,00	37,79	39,00	38,56	41,00	38,56
	Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	%	NA	NA	NA	NA	100,00	66,67	100,00	80,00	100,00	84,21	100,00	84,21%
3	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	%	NA	NA	NA	NA	100,00	97,50	100,00	99,28	100,00	99,69	100,00	99,69%
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	NA	82,02	82,00	82,38	82,50	84,92	83,00	89,74	83,50	90,85	84,50	90,85

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Target 2026	Realisasi Akhir
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian		
	Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	NA	NA	100,00	97,49	100,00	88,22	100,00	96,25	100,00	97,49	100,00	97,49
4	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	67,30		NA
	Skor EPPD		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3,66		NA
	Maturitas SPIP	Angka	NA	NA	NA	NA		2,601		3,00		3,139		3.139
	Persentase tindak lanjut hasil SKM	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	42		NA

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan pada periode Renstra mendatang, serta perlu ditambahkan antara lain:

1. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pertriwulan

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah pertriwulan pada tahun 2024 sebesar 96,22% dari target 85,00% Namun demikian evaluasi maupun pengukuran kinerja perangkat daerah perlu terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja agar lebih baik dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi serta melakukan evaluasi sebagai bentuk perbaikan strategi dan pelaksanaan program ke depan.

2. IKK

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan publik dari sisi perencanaan, implementasi, evaluasi, keberlanjutan dan transparansi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan reformasi birokrasi. Pada tahun 2024 IKK berada pada angka 67,30 dengan status predikat baik, Namun demikian pengukuran kualitas kebijakan perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan.

3. IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah pada tahun 2024 mencapai angka 90,85 yang artinya apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, capaian IKM selalu naik. Hal ini menandakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah semakin membaik. Meski demikian skor IKM masih perlu ditingkatkan mengingat pelayanan Sekretariat Daerah tidak terlepas dari partisipasi masyarakat serta agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif Sekretariat Daerah. Perhatian dalam peningkatan kualitas pelayanan antara lain pada aspek sarana dan prasarana seperti ruang tunggu dan waktu penyelesaian layanan.

4. Indeks Tata Kelola PBJ

Penilaian indeks tata kelola pengadaan dapat diperoleh melalui indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan

tingkat kematangan UKPBJ. Capaian kinerja indeks tata kelola pengadaan pada tahun 2022 dengan nilai 33,50 (predikat kurang) belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu >70 s.d 90 dengan predikat baik.

Rendahnya indeks tata kelola pengadaan disebabkan karena indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ di tahun 2022 masih rendah, dari kebutuhan JF PPBJ sebanyak 25 orang hanya terdapat 9 orang pada UKPBJ Kabupaten Wonosobo. Selain hal tersebut, penyebab lainnya yakni indikator tingkat kematangan UKPBJ yang belum memenuhi target tingkat kematangan UKPBJ dengan level 3 (proaktif). Capaian kematangan UKPBJ di tahun 2022 masih pada level 1 (inisiasi).

Capaian kinerja indeks tata kelola pengadaan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu termasuk kategori cukup dengan nilai 69,70. Meski di tahun 2024 sudah ada kenaikan yaitu dengan nilai 84,95, tetapi pemenuhan JF PPBJ masih belum terpenuhi. Dengan demikian, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BKD untuk pemenuhan JF PPBJ.

5. Nilai KOD

Walaupun Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024, bukan berarti telah berhasil dengan baik, namun demikian masih adanya kelemahan yang menjadi perhatian yakni terkait potensi, keterbatasan sumber daya, dan tantangan pelaksanaan berkelanjutan yang harus diatasi agar hasilnya benar-benar kuat dan berkelanjutan.

6. Nilai ketercapaian SPM layanan dasar

Pada Indikator Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar dari target kinerja yang telah ditentukan sebesar 100%, di tahun 2023 terealisasi sebesar 97,28%, sedangkan di tahun 2024 terealisasi 99,69% per 10 Januari 2025. Data terakhir yang didapat per 20 Januari 2025 terealisasi sebesar 99,71%, karena penambahan data terbaru dari urusan kesehatan. Dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 5 urusan tercapai 100% yaitu urusan pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman ketertiban dan perlindungan masyarakat dan sosial. Sedangkan 1 urusan tercapai 98,23% yaitu urusan kesehatan dengan 12 indikator yang terdiri dari 5 indikator tercapai 100% dan 7 indikator tercapai antara 90,00% - 99,95% sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif; dan
- g. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi.

Ketidaktercapaian urusan kesehatan pada 7 indikator tersebut menjadi kelemahan yang disebabkan karena tidak dapat diprediksikannya target dari indikator yang telah ditetapkan.

7. Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) pada tahun 2024 sebesar 3,66. Nilai ini didapat dari perhitungan oleh Kemendagri yang digunakan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yakni sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah tercapai serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. Maturitas SPIP

Skor 3,00 pada tahun 2023 menjadi 3,139 di tahun 2024 menandakan adanya peningkatan kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintahan, skor ini menandakan perbaikan dalam penerapan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih baik. Namun demikian masih terdapat kelemahan yakni kurangnya konsistensi dalam implementasi pengendalian intern di semua unit kerja, belum optimalnya budaya pengendalian, serta masih adanya potensi risiko yang belum teridentifikasi atau dikelola dengan efektif. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah perbaikan berkelanjutan, seperti pelatihan SDM, peningkatan pengawasan, dan penguatan sistem dokumentasi agar maturitas SPIP dapat meningkat lebih lanjut.

9. Persentase tindaklanjut hasil SKM

Persentase tindaklanjut hasil SKM digunakan untuk mengukur efektivitas tindaklanjut atas rekomendasi dan temuan dari hasil SKM, hal ini mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil SKM serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya perbaikan layanan. Namun demikian

terdapat kelemahan yakni proses analisis hasil survei cenderung lambat, sehingga rekomendasi perbaikan sering terlambat diimplementasikan, kurangnya koordinasi antarunit kerja dalam menindaklanjuti temuan survei menyebabkan adanya ketidaksesuaian prioritas perbaikan dan kurangnya sinergi antar OPD terkait, selain itu sumber daya manusia yang menangani tindak lanjut belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai dalam melakukan evaluasi serta perencanaan berbasis data survei.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan bagian penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Sekretariat Daerah (Setda) sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung Bupati Wonosobo dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administratif secara menyeluruh. Secara lebih spesifik, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo memiliki tugas utama membantu Bupati dalam:

- Penyusunan dan perumusan kebijakan daerah,
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah,
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah,
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN),
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mendasar pada Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka Sekretariat Daerah didalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi pemerintah daerah, yakni *“Mewujudkan Wonosobo yang Sejahtera Adil dan Makmur”*

Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo meliputi:

1. Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo

Perangkat Daerah (PD) merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tertentu. Sebagai kelompok sasaran maka PD mendapatkan pelayanan administratif, fasilitasi dan juga koordinasi dari Sekretariat Daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

masing-masing perangkat daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka Sekretariat Daerah berperan dalam membantu PD melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Dengan adanya pelayanan yang optimal maka diharapkan PD dapat bekerja secara sinergis dalam mewujudkan Visi dan Misi “PRESTASI” Kabupaten Wonosobo.

2. Desa

Desa merupakan pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat serta menjadi kelompok sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pelayanan yang diberikan meliputi pembinaan bantuan hukum, fasilitasi dan juga dukungan administratif dan teknis terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan publik. Sehingga hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya dukungan dari Sekretariat Daerah maka desa-desa di Kabupaten Wonosobo akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat pembangunan berbasis partisipasi warga/masyarakat.

3. Pihak ketiga/penyedia jasa

Pihak ketiga/penyedia jasa merupakan kelompok sasaran yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama kontraktual seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa. Sekretariat daerah berperan dalam memfasilitasi proses administrasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Kerjasama ini dilakukan dengan maksud memastikan proyek berjalan lancar sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kelompok Sasaran Pelayanan ini juga berperan dalam mendukung fungsi-fungsi asisten dalam Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi. Masing-masing asisten mengkoordinasikan bidang tugasnya, mulai dari pemerintahan umum, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hingga administrasi dan kepegawaian

2.5. Mitra Sekretariat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah bermitra dengan beberapa lembaga maupun organisasi terkait demi melaksanakan pelayanan dan mencapai tujuan Sekretariat Daerah. Adapun lembaga maupun organisasi yang bermitra dengan Sekretariat Daerah digolongkan dalam beberapa kelompok tertentu sesuai kegiatan yang berkaitan sebagai berikut:

1. Kelompok Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 - a. Bidang Keagamaan meliputi Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) Kabupaten Wonosobo, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Wonosobo, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Yayasan Amal dan Kesejahteraan Umat Islam (Yakaumi), Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Quran (Badko LPQ), Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), Forum Koordinasi Pondok Pesantren (FKPP), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
 - b. Bidang Kesehatan meliputi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Palang Merah Indonesia (PMI), Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), Wonosobo Youth Center (WYC) terkait Skrining HIV/AIDS, LPTP terkait pemberdayaan masyarakat, Mentari Sehat Indonesia (MSI) terkait Skrining TBC, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) dan Warga Peduli AIDS (WPA) terkait HIV, Kita Institute, Aqua/Danone, Baznas dan Bank Jateng.
 - c. Bidang Kepemudaan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Komite Olahraga Rekreasi Indonesia (KORMI) dan National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI).
 - d. Bidang Pendidikan, Bagian Kesra telah melakukan kolaborasi/kerjasama dengan Bank Jateng, Geodipa dan Baznas untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi warga miskin. Selain itu, Bagian Kesra juga melakukan kerjasama Verval data ATS dan mendorong ATS untuk kembali ke sekolah dengan pihak Kecamatan, Desa dan Bhabinsa.
 - e. Bidang Hukum yakni Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UNSIQ.

2. Kelompok Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Bidang Perekonomian meliputi PT Pupuk Indonesia, PT Petrokimia Gresik, dan Kantor Bea Cukai Magelang.

3. Kelompok Asisten Administrasi Umum

Bidang Media meliputi Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres, Suara Baru, Mercusuar TV, Pikiran Rakyat, TV One, Detik.com, TVRI, Jawa Pos, Sorot.com, Mercusuar, Tribun Jateng, Wonosobozone, Pesona FM, Satumenitnews, dan Populinews.com.

2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Wonosobo memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah. Peran ini tercermin dari kontribusi BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

BUMD di Kabupaten Wonosobo juga berkontribusi dalam memberikan dukungan pencapaian kinerja perangkat daerah melalui penyaluran CSR. Dukungan BUMD sangat terasa dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah, khususnya dalam aspek optimalisasi kinerja BUMD yang diukur melalui kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD. Capaian ini menjadi salah satu indikator strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang selaras dengan visi ***"Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil dan Makmur"***.

2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Sekretariat Daerah

Kerjasama daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 proses Kerja Sama dalam suatu Daerah difasilitasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang terdiri dari beberapa Perangkat Daerah yaitu Bappeda, BPPKAD, Bagian Hukum, Setda dan Bagian Pemerintahan, Setda selaku Sekretariat TKKSD.

Di Kabupaten Wonosobo, tanggung jawab utama dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengelola kerjasama daerah berada pada Sekretariat Daerah (Setda). Dalam hal ini adalah Bagian Pemerintahan. Peran ini diatur secara jelas

dalam regulasi daerah dan menjadi bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dalam Kerjasama Daerah

Sekretariat Daerah Wonosobo memiliki tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, termasuk dalam hal kerjasama daerah. Fungsi utama Setda terkait kerjasama daerah meliputi:

1. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah

Setda bertanggung jawab menyiapkan bahan, merumuskan, serta mengoordinasikan kebijakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik antar daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, maupun sektor swasta.

2. Koordinasi dan Fasilitasi

Setda melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan mitra eksternal guna memastikan pelaksanaan kerjasama berjalan efektif, sesuai tujuan, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Setda memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama, serta menyusun laporan perkembangan dan capaian yang menjadi dasar pengambilan kebijakan lanjutan.

4. Pelayanan Administratif

Setda memberikan pelayanan administratif dalam proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerjasama, serta publikasi informasi kerjasama daerah kepada masyarakat luas.

Sebagai respons terhadap tuntutan pelayanan publik yang prima dan digitalisasi pemerintahan, Sekretariat Daerah Wonosobo melalui bagain Pemerintahan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kerjasama Daerah Kabupaten Wonosobo (ASIK SOBO). Aplikasi ini mempermudah proses fasilitasi, dokumentasi, dan publikasi informasi kerjasama daerah, sekaligus mendukung reformasi birokrasi tematik digitalisasi organisasi pemerintahan. Dengan adanya ASIK SOBO, proses kerjasama menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Beberapa bentuk kerjasama daerah yang telah difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Wonosobo antara lain:

1. Kerjasama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP):

Kolaborasi lintas instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik yang terintegrasi dan berkualitas bagi Masyarakat.

2. Kerjasama Pengelolaan Lingkungan:

Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Setda memfasilitasi kerjasama dengan rumah sakit dan pihak swasta dalam pengelolaan limbah B3, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan hidup

3. Kerjasama Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi:

Penandatanganan MoU dengan berbagai lembaga pendidikan, kesehatan, dan pelaku usaha untuk mendukung pembangunan daerah secara komprehensif Kerjasama daerah yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Wonosobo menjadi kunci dalam mendorong sinergi antarpihak, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi digital seperti ASIK SOBO menjadi bukti komitmen Setda Wonosobo dalam menghadirkan tata kelola kerjasama daerah yang modern, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Seluruh upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo.

2.8. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo tentunya tidak terlepas dari adanya permasalahan dan juga hambatan yang sedikit banyak akan mempengaruhi pencapaian indikator kinerja. Permasalahan tersebut adalah:

1. Belum optimalnya penataan kelembagaan yang berkualitas tinggi untuk kesiapan implementasi kebijakan.

Belum tercapainya penataan kelembagaan yang berkualitas tinggi untuk kesiapan implementasi kebijakan disebabkan karena belum maksimalnya SDM yang kompeten dan berkualitas serta belum optimalnya budaya organisasi BerAKHLAK dalam organisasi Pemerintahan.

2. Belum optimalnya pelaksanaan Implementasi Kebijakan dengan Tepat Sasaran.

Belum optimalnya pelaksanaan implementasi kebijakan tepat sasaran disebabkan karena belum optimalnya pencapaian peningkatan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta belum optimalnya penerapan program yang memiliki indikator berdampak terhadap

masyarakat.

3. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan yang berkualitas dan selaras.

Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan yang berkualitas dan selaras disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan perumusan kebijakan *based on evidence* dan permasalahan aktual yang selaras dengan kebijakan lain, belum optimalnya pelaksanaan implementasi kebijakan secara efektif di lapangan, serta belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengawasan implementasi kebijakan untuk perbaikan keberlanjutan.

4. Belum optimalnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan

Belum optimalnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo disebabkan belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan sarpras yang berkeadilan serta belum optimalnya inovasi pelayanan publik.

Permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II. 9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya budaya tata kelola yang lebih responsif, transparan dan bertanggungjawab melalui mekanisme kontrol dan dorongan perbaikan kebijakan berkualitas yang menjadi dasar dari perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan/ pertanggungjawaban program dan efektivitas kinerja	Belum optimalnya penataan kelembagaan yang berkualitas tinggi untuk kesiapan implementasi kebijakan	Belum maksimalnya SDM yang kompeten dan berkualitas
			Belum optimalnya budaya organisasi BerAKHLAK dalam organisasi Pemerintahan
		Belum optimalnya pelaksanaan Implementasi Kebijakan dengan Tepat Sasaran	Belum optimalnya pencapaian peningkatan Kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan penerapan program yang memiliki indikator berdampak terhadap masyarakat
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, evaluasi	Belum optimalnya pelaksanaan perumusan kebijakan <i>based on evidence</i> dan permasalahan

	dan keberlanjutan kebijakan yang berkualitas dan selaras	aktual yang selaras dengan kebijakan lain
		Belum optimalnya pelaksanaan implementasi kebijakan secara efektif di lapangan
		Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengawasan implementasi kebijakan untuk perbaikan keberlanjutan
	Belum optimalnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintahan	Belum optimalnya kepatuhan terhadap indikator SPM Nasional
		Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan dan penyediaan sarpras yang berkeadilan
		Belum optimalnya inovasi pelayanan publik

2.9. Isu Strategis Sekretariat Daerah

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta secara etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan

peluang dan ancaman bagi Sekretariat Daerah di masa lima tahun mendatang.

Adapun isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

1. Kualitas Kebijakan
2. Pelayanan Publik yang Inklusif

Tabel II. 10
Isu Strategis Sekretariat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			NASIONAL	PROVINSI	DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber daya pengelola kebijakan terpusat di Sekretariat Daerah yang berpotensi sebagai penggerak <i>evidence based policy</i> di daerah. Dalam hal ini selaras dengan fungsi Sekretariat Daerah dalam hal perumusan, koordinasi, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	Akselerasi tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan adaptif belum optimal	Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan adaptif	Pelayanan publik yang inklusif dan kebijakan yang berkualitas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH

Visi Kabupaten Wonosobo “**Mewujudkan Wonosobo Sejahtera, Adil, dan Makmur**” diharapkan menjadi cita-cita dan ruh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Wonosobo serta memiliki keterukuran keberhasilannya dalam mewujudkan Kabupaten Wonosobo yang sejahtera, adil, dan makmur. “**Sejahtera**” yang dimaksud adalah kondisi dimana masyarakat Wonosobo terpenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi maupun sosial. “**Adil**” yakni kondisi Wonosobo yang lebih merata dan seimbang. “**Makmur**” ialah kondisi Wonosobo yang maju, aman dan lingkungan yang berkelanjutan (lestari). Maju yakni kemampuan daerah untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional, dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif, kompetitif, teknologi dan inovasi. Aman yang dimaksud ialah kondisi adanya kepastian, jaminan dalam berusaha. Berkelanjutan ialah keseimbangan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang lestari, tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan delapan misi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, yakni:

1. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian dengan tersedianya akses pendidikan dan kesehatan;
2. Revitalisasi infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan agrobisnis dan pariwisata;
3. Eratkan persatuan untuk penguatan harmonisasi keberagaman;
4. Siapkan peluang produktif untuk generasi penerus bangsa yang berdaya saing;
5. Tumbuh dan kembangkan koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat;
6. Amankan dan pelihara kelestarian lingkungan hidup dan warisan budaya lokal;
7. Sediakan akses pasar regional dan nasional untuk produk unggulan Kabupaten Wonosobo;
8. Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengembangan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).

Keterlibatan langsung Sekretariat Daerah ditunjukkan melalui pernyataan Misi ke-8 yaitu “*Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan*

terpercaya sebagai pengembangan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat)". Selain pernyataan misi ke-8, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo juga mendukung program unggulan.

Dengan berdasarkan pada delapan program unggulan Kabupaten Wonosobo pada RPJMD 2025-2029 maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ikut mendukung suksesnya program tersebut melalui penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun.

3.1.1 Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yang berhubungan dengan layanan dan tugas fungsi Sekretariat Daerah. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai

tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Salah satu tujuan pemerintah daerah adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**. Sasaran pemerintah daerah pada tujuan tersebut adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Terpercaya”**, maka tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 adalah **“Menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan responsif”**.

3.1.2 Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh perangkat Daerah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025-2029 adalah :

TUJUAN		SASARAN	
1	Menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan responsif	1.	Meningkatnya implementasi kebijakan
		2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan
		3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel
		4.	Meningkatnya transparansi dan partisipasi publik

Keterkaitan (interelasi) tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo selanjutnya disusun dalam tabel berikut :

Tabel III. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	SATUAN	TARGET TAHUN						Ket	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan responsif		Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	NA	Angka	68,70	70,20	72,10	74,40	76,30	78,60	Sekretaris Daerah	
	Meningkatnya kualitas pengendalian implementasi kebijakan	Maturitas SPIP	3,14	Angka	3,19	3,23	3,25	3,27	3,30	3,32	Sekretaris Daerah	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan	Rata-rata Capaian kinerja perangkat Daerah	7,45	Angka	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	Sekretaris Daerah
		Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,66	Angka	3,68	3,71	3,76	3,79	3,82	3,85	Sekretaris Daerah	
		Persentase ketercapaian SPM	99,71	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretaris Daerah
		Persentase Ketepatan Sasaran Program Penanganan Kemiskinan	N/A	%	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	Sekretaris Daerah	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	38,56	Angka	39,68	41,30	41,90	42,60	43,25	44,10	Sekretaris Daerah	

	yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel										
	Meningkatnya transparansi dan partisipasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,85	Angka	91,00	91,5	92,00	92,50	93,00	93,50	Sekretaris Daerah

Tabel III. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Wonosobo yang Sejahtera, Adil, dan Makmur			
Misi 8 : Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengembangan Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat).			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan responsif	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Impementasi kebijakan	Meningkatkan kualitas kebijakan	a. Pengembangan struktur dan proses kerja organisasi pemerintah daerah yang sesuai prioritas daerah; b. Peningkatan kualitas perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan; c. Penguatan desain kebijakan yang adaptif dan berdampak jangka panjang sesuai prioritas daerah.
	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan		
	Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel		
	Meningkatnya transparansi dan partisipasi publik		

3.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan instrumen yang menjelaskan bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan sasaran Renstra dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara efektif dan efisien. Dengan adanya perencanaan strategis diharapkan upaya pemerintah, dalam hal ini Sekretariat Daerah, dapat mengoptimalkan kinerja maupun perbaikan kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya. Yang tentunya difokuskan pada peningkatan efisiensi, koordinasi, dan pelayanan administrasi pemerintah daerah. Kebijakan utamanya meliputi penguatan sistem tata kelola pemerintahan, digitalisasi proses administrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan ini memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat mendukung kelancaran tugas Kepala Daerah, mewujudkan layanan publik yang responsif, dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional serta akuntabel.

Dengan strategi tersebut, Sekretariat Daerah berupaya menjadi motor penggerak birokrasi daerah yang adaptif terhadap perubahan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

3.2.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan adanya strategi. Adapun strategi yang harus dilaksanakan adalah mengembangkan struktur dan proses kerja organisasi pemerintah daerah yang sesuai prioritas daerah, meningkatkan kualitas perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta melakukan penguatan desain kebijakan yang adaptif dan berdampak jangka panjang sesuai prioritas daerah. Strategi tersebut merupakan upaya atau langkah-langkah yang dilaksanakan dalam program-program yang telah ditentukan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut tidak lepas dari adanya kekuatan dalam meraih peluang dan menghadapi tantangan yang ada. Rumusan strategis adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu sasaran akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dan diimplementasi dengan kebijakan.

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra dapat dilihat dalam Tabel Penahapan Renstra berikut ini.

Tabel III. 3
Penahapan Renstra Sekretariat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif	Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif	Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif

Tabel penahapan renstra tersebut di atas merupakan penahapan selama 5 tahun dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030, dimana setiap tahunnya penahapan renstra dapat dijelaskan dibawah ini:

Tahap I Tahun 2026.

Pada penahapan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2026 yang dijabarkan melalui Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah maka upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan kebijakan adalah “penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas dan inklusif” melalui:

1. Penguatan postur kelembagaan perangkat daerah;
2. Penguatan kualitas kebijakan;
3. Penguatan sistem akuntabilitas pemerintah daerah;
4. Penguatan sistem regulasi kinerja ASN;
5. Penguatan kerjasama daerah.

Tahap II Tahun 2027.

Pada tahap II tahun 2027 pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah adalah upaya “Transformasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif” yang dilaksanakan melalui:

1. Implementasi kelembagaan perangkat daerah yang efektif, efisien, adaptif, dan berintegritas;
2. Peningkatan kualitas kebijakan;

3. Penguatan sistem akuntabilitas pemerintah daerah;
4. Penguatan sistem kinerja ASN;
5. Penguatan kerjasama daerah.

Tahap III Tahun 2028

Pada penahapan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2028 yang dijabarkan melalui Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah maka upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah adalah “Pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif ” melalui:

1. Penguatan proses bisnis perangkat daerah yang efektif, efisien, adaptif, kolaboratif, dan berintegritas;
2. Peningkatan kualitas kebijakan;
3. Peningkatan sistem akuntabilitas pemerintah daerah;
4. Evaluasi sistem kinerja ASN;
5. Penguatan kerjasama daerah.

Tahap IV Tahun 2029

Pada penahapan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2029 yang dijabarkan melalui Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah maka upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah adalah “Pemantapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif ” melalui:

1. Peningkatan proses bisnis perangkat daerah yang efektif, efisien, adaptif, kolaboratif, dan berintegritas;
2. Peningkatan kualitas kebijakan;
3. Peningkatan sistem akuntabilitas pemerintah daerah;
4. Penguatan kerjasama daerah.

Tahap V Tahun 2030

Pada penahapan pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2030 yang dijabarkan melalui Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah maka upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah adalah “Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berintegritas dan inklusif” melalui:

1. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan perwujudan proses bisnis perangkat daerah yang efektif, efisien, adaptif, kolaboratif, dan berintegritas;
2. Evaluasi dampak kebijakan;
3. Perwujudan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang efektif dan

efisien;

4. Peningkatan kerjasama daerah.

Maka dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, didukung dengan kebijakan program. Seluruh program tersebut didorong untuk dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Sementara arah kebijakan Renstra Setda menitikberatkan pada peningkatan koordinasi, efisiensi birokrasi, penguatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional.

Dengan demikian, Renstra Setda Wonosobo secara sistematis memuat unsur Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai dasar normatif arah kebijakan strategis yang fokus pada penguatan fungsi administratif dan koordinatif, serta mengacu dan mendukung pencapaian arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo dalam menjalankan misi pembangunan daerah.

NSPK bersifat sebagai kerangka normatif dan operasional yang mengatur standar pelaksanaan tugas dan fungsi Setda, sebagai alat evaluasi kinerja terhadap tujuan strategis yang ditetapkan.

3.2.2 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu instrumen yang digunakan oleh Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan agar terarah. Renstra Sekretariat Daerah merupakan tahapan Pembangunan lima tahunan. Tahapan tersebut harus mencerminkan permasalahan dan isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Rumusan arah kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Wonosobo meliputi NSPK, arah kebijakan Renstra, dan arah kebijakan RPJMD berdasarkan pedoman umum penyusunan Renstra perangkat daerah dan kesesuaian dengan dokumen RPJMD:

Tabel III. 4
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK (Norma, standar, prosedur, kriteria)	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perbup No 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo secara efisien dan efektif sesuai penyederhanaan birokrasi dan regulasi nasional.	Menyusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setda dalam rangka mendukung RPJMD dan pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas kebijakan melalui pengembangan struktur dan proses kerja organisasi pemerintah daerah yang sesuai prioritas daerah, peningkatan kualitas perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta penguatan desain kebijakan yang adaptif dan berdampak jangka panjang sesuai prioritas daerah.	
	Melaksanakan tugas perumusan dan penyusunan kebijakan daerah, koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pengelolaan administrasi daerah.	Memfokuskan pembangunan pada peningkatan kinerja birokrasi, penguatan koordinasi antar OPD, dan penyediaan data serta informasi untuk pengambilan keputusan.		
	Menjamin keselarasan kebijakan dan pengendalian internal melalui tata kerja yang mendukung pencegahan korupsi dan pengawasan internal.	Pengendalian internal pemerintah dan akuntabilitas kinerja melalui penerapan SPIP, SAKIP, dan prinsip <i>good governance</i> .		
	Menyediakan layanan administrasi dan dukungan teknis manajemen pemerintahan daerah secara profesional.	Meningkatkan kapasitas SDM Setda dan penyediaan layanan yang responsif untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, rincian tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Program PD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per-PD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan PD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah PD.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan PD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Program-program Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ada 3 Program sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
2. Program Perekonomian dan dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025–2029 terurai pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
SD.8.2.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas dan Terpercaya	Menciptakan Kebijakan Publik yang Berkualitas dan Responsif				Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengendalian Implementasi kebijakan			Maturitas SPIP		
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi umum		Persentase perangkat daerah dengan capaian SAKIP "BB"	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
					Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
					Jumlah Dokumentasi peningkatan kinerja Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
			Meningkatnya kualitas kebijakan		Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Adbang

			perekonomian dan pembangunan				
					Persentase ketercapaian kinerja pada sekretariat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Adbang
					Persentase ketercapaian anggaran pada sekretariat Daerah		Bagian Adbang
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Bagian Adbang
		Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan			Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah		
					Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		
					Persentase Ketercapaian SPM		
					Persentase ketepatan sasaran program penanganan kemiskinan		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase propemperda propemperbup Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)	Program Pemerintahan dan Kesra	Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian Hukum

					Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra		
					Persentase propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi		
					Persentase propemperbup yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi		
					Persentase ketepatan sasaran program penanganan kemiskinan dibawah koordinasi asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		
					Persentase propemperda propemperbup terkait Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)	Administrasi tata pemerintahan	Bagian Pemerintahan
					Persentase Capaian Urusan Pemerintahan Daerah pada LPPD yang Meningkatkan		Bagian Pemerintahan
					Persentase Urusan Pemerintahan Daerah pada LKPJ dengan kategori "tinggi" dan "sangat tinggi"		Bagian Pemerintahan
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah	Bagian Pemerintahan
					Persentase Kesepakatan MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS)	Fasilitasi Kerjasama daerah	Bagian Pemerintahan
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Bagian Pemerintahan
					Persentase propemperda propemperbup terkait Bagian Kesra yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra
					Persentase hasil koordinasi pada perangkat daerah dibawah koordinasi Bagian Kesra yang ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan		Bagian Kesra
					Indeks Zakat Nasional		Bagian Kesra
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
					Jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra

					Penduduk dan KB		
					Jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibmas	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra
					Indeks Reformasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum
					Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
					Jumlah kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	Bagian Hukum
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		Persentase Propemperda Propemperbup di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pemabangunan yang ditindaklanjuti melalui Produk Kerjasama Formal (Perda, Perbup)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bag. Perekonomian, Adbang,
					Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
					Persentase Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		

					Persentase BUMD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		
					Persentase Ketepatan sasaran Program Penanganan Kemiskinan di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
					Return Of Assets Badan Usaha Milik Daerah (ROA BUMD)	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Bagian Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian
					Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Realisasi Kinerja Triwulanan Kategori "Sangat Tinggi"	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Adbang
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Adbang
					Jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Adbang
					Persentase Kebijakan yang tertangani	Pemantauan Kebijakan SDA	Bagian Perekonomian
					Indeks Akses Keuan Daerah (IKAD)gan		Bagian Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Bagian Perekonomian

					Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup,	Bagian Perekonomian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Bagian Perekonomian
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan administrasi Umum		Persentase Propemperda Propemperbup di bawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum yang di tindaklanjuti melalui produk kebijakan Formal (Perda, Perbup)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian. Organisasi,
					Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum		Bagian. Organisasi
					Persentase propemperda propemperbup terkait Bagian Organisasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda,	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi

					Perbup)		
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
		Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel			Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan administrasi Umum		Persentase Perangkat Daerah dengan Kematangan Organisasi "tinggi"	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
					Indeks BerAKHLAK		
					Persentase Perangkat Daerah yang memiliki struktur yang sesuai peraturan Perundang- Undangan	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi
		Sasaran 4: Meningkatnya transparansi dan partisipasi publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian PBJ
					Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Pengelolaan pengadaan barang dan	Bagian PBJ

						jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Bagian PBJ
					Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan LPSE	Bagian PBJ
					Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Bagian PBJ
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Umum		Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman RI)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi, Prokompim, Umum
					Persentase Unit Kerja dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "sangat baik"		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah		
					Persentase Rekomendasi Ombudsman yang DitindaklanjutiNilai	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi
					Persentase Kegiatan Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yang dipublikasikan	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Bagian Prokompim
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi keprotokolan	Bagian Prokompim
					Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Komunikasi	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Bagian Prokompim

				Pimpinan		
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pendokumentasian tugas pimpinan	Bagian Prokompim
				Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi keuangan perangkat daerah	Bagian Umum
				Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Umum
				Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Umum
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bagian Umum
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bagian Umum
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Umum
				Jumlah Paket Bahan/Material yang	Penyediaan Bahan/Material	Bagian Umum

					Disediakan		
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Bagian Umum
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum
					Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dsediaan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Umum
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Bagian Umum
					Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Bagian Umum

					Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum
					Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Umum
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Umum
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Bagian Umum
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bagian Umum
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Umum
					Jumlah Sarana dan	Pemeliharaan/Rehabilit	Bagian Umum

					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Bagian Umum
					Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum
					Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala	Bagian Umum

					Disediakan	Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bagian Umum

Tabel IV. 2
Rencana Program / Kegiatan / Sub kegiatan/ dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				21.037.705.000,-		21.273.671.000,-		21.347.869.000,-		22.843.786.000,-		22.027.599.000,-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.499.705.000,-		14.662.671.000,-		14.713.869.000,-		15.744.786.000,-		15.182.599.000,-	Bag Umum, Organisasi, Prokompim
				13.541.274.500,-		13.693.468.447,-		13.741.282.259,-		14.704.055.645,-		14.179.029.206,-	Bag.Umum
				329.143.304,-		332.842.632,-		334.004.826,-		357.406.642,-		344.644.997,-	Bag. Organisasi
				629.287.197,-		636.359.921,-		638.581.915,-		683.323.712,-		658.924.797,-	Bagian Prokompim
	Persentase Perangkat Daerah dengan capaian SAKIP "BB"		58,00 %		63,00 %		69,00 %		73,00 %		76,00 %		
	Persentase Propemperda Propemperbup dibawah koordinasi Asisten dministrasi Umum yang ditindaklanjuti melalui Produk Kebijakan Formal (Perda, Perbup)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum		85,00 %		85,00 %		85,00 %		85,00 %		85,00 %		

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Perangkat Daerah dengan Kematangan Organisasi "tinggi"		70,00 %		74,00 %		78,00 %		82,00 %		84,00 %		
	Indeks BerAKHLAK		80 angka		82 angka		83 angka		84 angka		85 angka		
	Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik (Ombudsman RI)		97,2 angka		97,4 angka		97,6 angka		97,8 angka		98 angka		
	Persentase unit kerja dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "sangat baik"		82,47 %		85,56 %		88,66 %		91,75 %		93,81 %		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretraiat Daerah		92,3 angka		92,6 angka		92,9 angka		93,2 angka		93,5 angka		
				13.541.274.500,-		13.693.468.447,-		13.741.282.259,-		14.704.055.645,-		14.179.029.206,-	Bag. Umum
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		98 %		98 %		98 %		98 %		98 %		Bag. Umum
Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		143 o/b		143 o/b		143 o/b		143 o/b		143 o/b		Bag. Umum
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		10 dok		10 dok		10 dok		10 dok		10 dok		Bag. Umum

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum		97,51 %		97,51 %		97,51 %		97,51 %		97,51 %			Bag. Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket			Bag. Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket			Bag. Umum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket			Bag. Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket			Bag. Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket		7 paket		7 paket		7 paket		7 paket			Bag. Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			Bag. Umum
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			Bag. Umum

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		24 laporan		24 laporan		24 laporan		24 laporan		24 laporan		24 laporan	Bag. Umum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan	Bag. Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Umum
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	Bag. Umum
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-		-		-		-		-		-	Bag. Umum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	Bag. Umum
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	Bag. Umum

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	Bag. Umum
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96,42 %		96,42 %		96,42 %		96,42 %		96,42 %		100 %	Bag. Umum
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	Bag. Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket		12 paket	Bag. Umum
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	Bag. Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket	Bag. Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		96,68 %		96,68 %		96,68 %		96,68 %		96,68 %		96,68 %	Bag. Umum

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16 Unit		16 Unit		16 Unit		16 Uni		16 Uni			Bag. Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		54 unit		54 unit		54 unit		54 unit		54 unit			Bag. Umum
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		221 unit		221 unit		221 unit		221 unit		221 unit			Bag. Umum
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit		22 unit			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor		39 unit		39 unit		39 unit		39 unit		39 unit			Bag. Umum
Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit		18 unit			Bag. Umum
Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		40 unit		40 unit		40 unit		40 unit		40 unit			Bag. Umum
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan		99,2 %		99,2 %		99,2 %		99,2 %		99,2 %			Bag. Umum

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 o/b		2 o/b		2 o/b		2 o/b		2 o/b			Bag. Umum
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		2 pket		2 pket		2 pket		2 pket		2 pket			Bag. Umum
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang			Bag. Umum
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 o/b		2 o/b		2 o/b		2 o/b		2 o/b			Bag. Umum
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Bag. Umum
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		8 paket		8 paket		8 paket		8 paket		8 paket			Bag. Umum

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		7 paket		7 paket		8 paket		8 paket		8 paket		8 paket	Bag. Umum
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretars Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket	Bag. Umum
Penataan Organisasi				329.143.304,-		332.842.632,-		334.004.826,-		357.406.642,-		344.644.997,-	Bagian Organisasi	
	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP		100 angka		100 angka		100 angka		100 angka		100 angka		100 angka	Bag. Org
	Persentase propemperda Propemperbup terkait Bagian Organisasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki struktur yang sesuai peraturan Perundang- Undangan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Org
	Persentase Rekomendasi Ombudsman yang		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Org

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Ditindaklanjuti													
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok		5 dok	Bag. Org
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		lapor an		lapor an		lapor an		lapor an		lapor an		lapor an	Bag. Org
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		dok		dok		dok		dok		dok		dok	Bag. Org
				629.287.197,-		636.359.921,-		638.581.915,-		683.323.712,-		658.924.797,-		Bag. Prokompim
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Prokompim
	Persentase kegiatan pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda) yang dipublikasikan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Prokompim
Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an	Bag. Prokompim
Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an	Bag. Prokompim
Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an		12 lapor an	Bag. Prokompim

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				4.593.000.000,-		4.644.000.000,-		4.661.000.000,-		4.987.000.000,-		4.809.000.000,-	Bag. Pemer, Kesra, Hukum
				918.600.000,-		928.800.000,-		932.200.000,-		997.400.000,-		961.800.000,-	Bag. Pemer
				3.169.170.000,-		3.204.360.000,-		3.216.090.000,-		3.441.030.000,-		3.318.210.000,-	Bag. Kesra
				505.230.000,-		510.840.000,-		512.710.000,-		548.570.000,-		528.990.000,-	Bagian Hukum
	Persentase Propemperda Propemperbup dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti melalui Produk Kebijakan Formal (Perda, Perbup)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi Pemerintahan dan Kesra		85,00 angk a		85,00 angk a		85,00 angk a		85,00 angk a		85,00 angk a		
	Persentase Propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Persentase Propemperbup yang ditindaklanjuti sampai dengan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	tahap fasilitasi													
	Persentase ketepatan sasaran program penanganan kemiskinan dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra		78,00 %		80,00 %		82,00 %		84,00 %		85,00 %			
				918.600.000,-		928.800.000,-		932.200.000,-		997.400.000,-		961.800.000,-		Bag Pemer
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Propemperda Propemperbup terkait Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti melalui Produk Kebijakan Formal (Perda, Perbup)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Bag Pemer
	Persentase capaian urusan Pemerintahan daerah pada LPPD yang meningkat		68,00 %		72,00 %		76,00 %		78,00 %		80,00 %			Bag Pemer
	Persentase urusan pemerintahan daerah pada LKPJ dengan kategori "tinggi" dan "sangat tinggi"		93,50 %		94,00 %		94,50 %		95,00 %		96,00 %			Bag Pemer
Penataan Administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			Bag Pemer

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Pemerintahan													
Pengelolaan Administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		3 dok	Bag Pemer
Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok		6 dok	Bag Pemer
Fasilitasi Kerjasama daerah	Persentase Kesepakatan MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag Pemer
Fasilitasi kerjasama Dalam negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		24 dok		24 dok		24 dok		24 dok		24 dok		24 dok	Bag Pemer
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3.169.170.000,-		3.204.360.000,-		3.216.090.000,-		3.441.030.000,-		3.318.210.000,-		Bagian Kesra
	Persentase propemperda propemperbup terkait Bagian Kesra yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Kesra
	Persentase hasil koordinasi pada perangkat daerah dibawah koordinasi Bagian Kesra yang		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Kesra

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan													
	Indeks Zakat Nasional		0,67 angka		0,70a nka		0,72 angka		0,75 angka		0,77 angka			Bag. Kesra
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		6 dok		6 dok		7 dok		8 dok		9 dok			Bag. Kesra
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		6 dok		6 dok		7 dok		7dok		8 dok			Bag. Kesra
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan		6 dok		6 dok		7 dok		7 dok		8 dok			Bag. Kesra

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas													
Fasilitasi dan koordinasi hukum				505.230.000,-		510.840.000,-		512.710.000,-		548.570.000,-		528.990.000,-	Bag. Hukum	
	Indeks Reformasi Hukum		98,30 angk a		98,50 angk a		98,70 agka		98,90 angk a		99 ,00an gka		Bag. Hukum	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Hukum	
Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Hukum	
Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Hukum	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.945.000.000,-		1.967.000.000,-		1.973.000.000,-		2.112.000.000,-		2.036.000.000,-	Bag. Perek, Adbang, PBJ	
				1.069.750.000,-		1.081.850.000,-		1.085.150.000,-		1.161.600.000,-		1.119.800.000,-	Bagian Perekonomi an	

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				447.350.000,-		452.410.000,-		453.790.000,-		485.760.000,-		468.280.000,-	Bagian Adbang
				427.900.000,-		432.740.000,-		434.060.000,-		464.640.000,-		447.920.000,-	Bagian PBJ
	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah		73 angk a		75 angk a		77 angk a		80 angk a		82 angk a		
	Persentase propemperda propemperbup di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan		85,00 angk a		85,00 angk a		85,00 angk a		85,00 angk a		85,00 angk a		
	Persentase Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian		80,00 %		90,00 %		100,0 0 %		100,0 0 %		100,0 0 %		
	Persentase BUMD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		80,00 %		80,00 %		90,00 %		90,00 %		100,0 0 %		

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Ketepatan Sasaran Program Penanganan Kemiskinan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan		78,00 %		80,00 %		82,00 %		84,00 %		85,00 %		
	Indeks tata kelola pengadaan		86,00 angka		87,00 angka		88,00 angka		89,00 angka		90,00 angka		
				1.069.750.000,-		1.081.850.000,-		1.085.150.000,-		1.161.600.000,-		1.119.800.000,-	Bag. Perek
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Return of Assets Badan Usaha Milik Daerah (ROA BUMD)		2,46 %		2,74 %		03,03 %		3,31 %		3,60 %		Bag. Perek
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD		25 dok		25 dok		25 dok		25 dok		25dok		Bag. Perek
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		15 laporan		15 laporan		15 laporan		15 laporan		15 laporan		Bag. Perek
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya kebijakan yang tertangani		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Bag. Perek
	Indels Akses Keuangan Daerah (IKAD)		4,78 angka		4,80 angka		4,82 angka		4,84 angka		4,85 angka		

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		25 dok		25 dok		25 dok		25 dok		25 dok		25 dok	Bag. Perek
Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok	Bag. Perek
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD		4dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				447.350.000,-		452.410.000,-		453.790.000,-		485.760.000,-		468.280.000,-		Bag. Adbang

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Persentase ketercapaian kinerja pada Sekretariat Daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Bag. Adbang
	Persentase ketercapaian anggaran pada Sekretariat Daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
	Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Realisasi Kinerja Triwulanan Kategori "sangat tinggi"		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok	Bag. Adbang
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		10 laporan		10 laporan		10 laporan		10 laporan		10 laporan		10 laporan	Bag. Adbang
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		15 laporan		15 laporan		15 laporan		15 laporan		15 laporan		15 laporan	Bag. Adbang
Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa				427.900.000,-		432.740.000,-		434.060.000,-		464.640.000,-		447.920.000,-	Bag. PBJ	
	Skor pemanfaatan sistem Pengadaan		24 angka		24,50 angka		25,00 angka		25,50 angka		26,00 angka		26,00 angka	Bag. PBJ

BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok	Bag. PBJ
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok	Bag. PBJ
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		100 oran g		100 oran g		100 oran g		100 oran g		100 oran g		100 oran g	Bag. PBJ

4.1 Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis operasional pada suatu instansi. (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama ini dalam rangka mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan terpercaya. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat daerah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel IV.3 dibawah ini

Tabel IV. 3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
1.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	angka	67,30	68,70	70,20	72,10	74,40	76,30	78,60	
2.	Maturitas SPIP	angka	3,14	3,19	3,23	3,25	3,27	3,30	3,32	
3.	Rata-rata Capaian kinerja perangkat Daerah	angka	7,45	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
4.	Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	angka	3,66	3,68	3,71	3,76	3,79	3,82	3,85	
5.	Persentase Ketercapaian SPM	%	99,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Persentase ketepatan sasaran program penanganan kemiskinan	%	NA	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	
7.	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)	angka	38,56	39,68	41,3	42,9	42,6	43,25	44,10	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	90,85	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	
9.	IKM Setda	angka	91,81	92,00	92,20	92,60	92,90	93,20	93,50	
10	KOD Setda	angka	38,56	39,68	41,30	41,90	42,60	43,25	44,10	
11.	Nilai SAKIP Setda	angka	72,62	70,30	73,00	75,00	77,00	80,00	82,00	

4.2 Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator/ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan. Adapun IKK Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel 1V.4 di bawah ini.

Tabel IV. 4
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat Daerah

No	INDIKATOR	SAT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Persentase perangkat daerah dengan capaian SAKIP "BB"	%	NA	53,85	58,00	63,00	69,00	73,00	76,00	
2.	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Angka	74,04	68,06	68,66	69,25	69,84	70,44	71,03	
3.	Persentase propemperda propemperbup perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)	%	88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Angka	83,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
5.	Persentase propemerda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Persentase propemperbup yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Persentase ketepatan sasaran program penanganan kemiskinan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	NA	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	
8.	Persentase propemperda propemperbup perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
9.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Angka	77,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
10	Persentase Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	%	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	
11	Persentase BUMD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	%	70,00	70,00	80,00	80,00	90,00	90,00	100,00	

No	INDIKATOR	SAT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	Persentase ketepatan sasaran Program penanganan kemiskinan di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	%	NA	75,00	78,00	80,00	82,00	84,00	85,00	
13.	Persentase propemperda propemperbup perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	angka	64,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
15.	Persentase perangkat daerah dengan Kematangan Organisasi "Tinggi"	%	64,10	67,00	70,00	74,00	78,00	82,00	84,00	
16.	Indeks BerAKHLAK	angka	76,30	78,00	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	angka	84,95	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	
18.	Opini pengawasan penyelenggaraan pelaporan publik (ombudsman RI)	angka	96,97	97,00	97,20	97,40	97,60	97,80	98,00	
19.	Persentase unit kerja dengan indeks kepuasan masyarakat "sangat baik"	%	78,35	80,04	82,47	85,56	88,66	91,75	93,81	
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	angka	91,81	92,00	92,30	92,60	92,90	93,20	93,50	
21.	Indeks Zakat Nasional	angka	0,62	0,65	0,67	0,70	0,72	0,75	0,77	
22.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	angka	98,08	98,10	98,30	98,50	98,70	98,90	99,00	
23.	Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	angka	4,72	4,76	4,78	4,80	4,82	4,84	4,85	

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub kegiatan prioritas dalam menunjang program prioritas pembangunan daerah yang ada disekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel IV.5 dibawah ini.

Tabel IV. 5
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan Sistem Kinerja ASN	Meningkatnya penataan organisasi daerah yang berkualitas	Kegiatan : Penataan Organisasi Sub Kegiatan : a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
1.	Bangga Bela Beli Pakai Produk Lokal		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
2.	Integrasi sekolah formal di pesantren (Fasilitasi koordinasi pendirian sekolah formal di pondok pesantren di bawah Dinas Pendidikan dan Kemenag)		Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
3.	Implementasi Prinsip Kabupaten Wonosobo Ramah HAM pada Layanan Publik		Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Sub Kegiatan: Fasilitasi Bantuan Hukum	

4.4 Program Pendukung Sekretariat Daerah Pada Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur

Program Pendukung Sekretariat Daerah pada Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada tabel IV.6 dibawah ini.

Tabel IV. 6
Program Dukungan Sekretariat Daerah pada Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur

No	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis (Provinsi Jawa Tengah)	Rencana Aktivitas Riil Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pelaksana
1.	PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak			
	Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
2.	PA. Pengembangan <i>sister province</i>			
	Penyusunan regulasi tentang <i>sister province</i> atau kerja sama daerah (KSD)	Penyusunan regulasi tentang kerja sama antar daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
	Promosi kerja sama <i>sister province</i>	Promosi kerja sama antar daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
	Pengembangan <i>sister province</i> pada sektor strategis (pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pariwisata, teknologi informasi)	Pengembangan kerjasama antar daerah pada sektor strategis	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
3.	PA. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalannya partisipasi berbasis Hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan)			
	Kerjasama dengan akademisi	Fasilitasi kerja sama daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
4.	PA. Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD			

No	Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis (Provinsi Jawa Tengah)	Rencana Aktivitas Riil Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo	Program Nomenklatur	Perangkat Daerah Pelaksana
	Merubah pergub terkait tata kelola BUMD	Pengelolaan BUMD	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)
5.	PA. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah			
	Penyusunan peraturan daerah tentang tata kelola CSR	Penyusunan perbup CSR	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)
	Penyusunan lembaga pengelola CSR			
	Identifikasi program yang dibiayai CSR	Identifikasi program yang dibiayai CSR	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian dan SDA)

Keterangan (PA) Program Aksi

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Sekretariat Daerah maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Wonosobo 2025-2029: “***Mewujudkan Wonosobo yang Sejahtera, Adil, dan Makmur***”.

POHON MASALAH SEKRETARIAT DAERAH

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas, dan Terpercaya

Belum optimalnya budaya tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan bertanggungjawab melalui mekanisme kontrol dan dorongan perbaikan kebijakan berkualitas yang menjadi dasar dari perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban program dan efektivitas kinerja

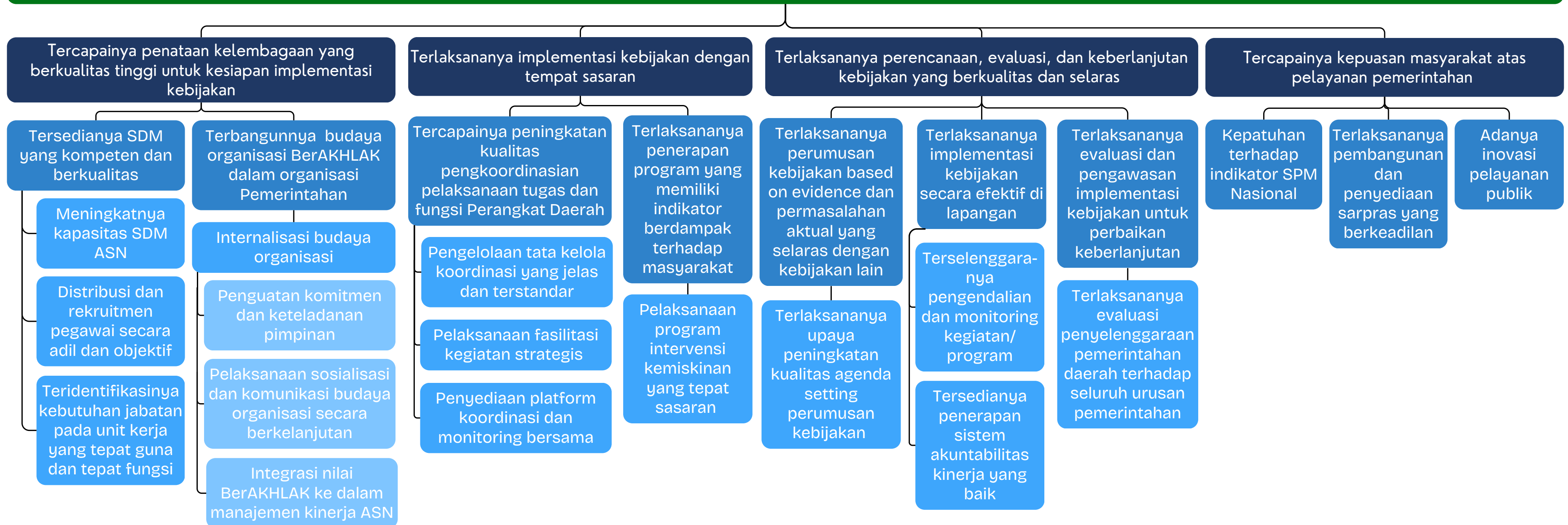


POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (IK: Indeks Kualitas Kebijakan)

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas, dan Terpercaya (IK: Indeks Kualitas Kebijakan)

Terbangunnya budaya tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan bertanggungjawab melalui mekanisme kontrol dan dorongan perbaikan kebijakan berkualitas yang menjadi dasar dari perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban program dan efektivitas kinerja (IK: Indeks Kualitas Kebijakan)

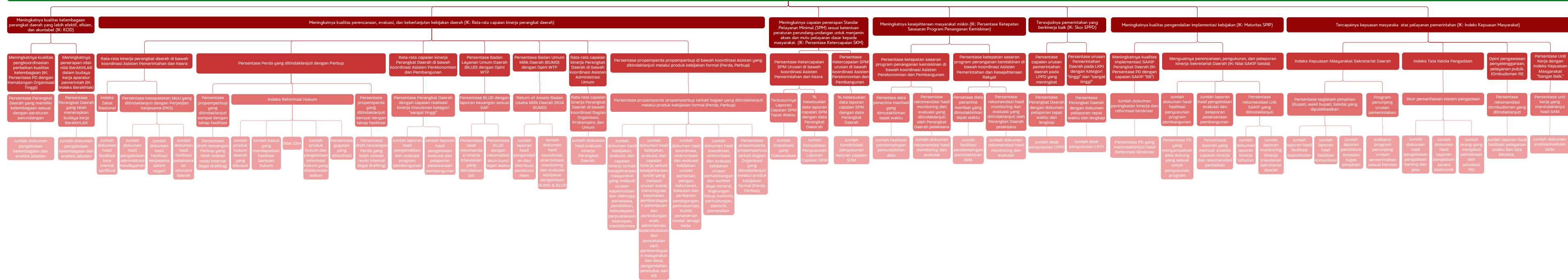


CASCADING SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (IK: Indeks Reformasi Birokrasi)

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Berintegritas, dan Terpercaya (IK: Nilai SAKIP, SKM)

Terbangunnya budaya tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan bertanggungjawab melalui mekanisme kontrol dan dorongan perbaikan kebijakan berkualitas yang menjadi dasar dari perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban program dan efektivitas kinerja (IK: Indeks Kualitas Kebijakan)



LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET						
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : MEWUJUDKAN WONOSOBO SEJAHTERA, ADIL, DAN MAKMUR																
MISI KE 8: Implementasikan tata kelola pemerintahan yang kompeten, akuntabel, dan terpercaya sebagai pengemban Ampera																
Tujuan 1: Menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan responsif																
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)		Ukuran komprehensif yang dirilis oleh LAN guna menilai kualitas proses rumusan kebijakan dan substansi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip-prinsip, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, berbasis bukti, dan berorientasi pada dampak.			Sekretaris Daerah	Angka	LAN	67.30	68.70	70.20	72.10	74.40	76.30	78.60	
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Impementasi kebijakan																
	Matritis SPIP		Tingkat kematangan atau kesiapan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan dan menjalankan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Matritis SPIP		Sekretaris Daerah	Angka	BPKP	3,14	3,19	3,23	3,25	3,27	3,3	3,32	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian SAKIP "BB"	Proporsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat "BB" berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Daerah atau Kementerian PANRB	-Jumlah perangkat daerah dengan capaian SAKIP "BB" - jumlah seluruh perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah dengan capaian SAKIP "BB" dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah X 100	Asisten Administrasi Umum	%	Inspektorat	NA	53.85	58.00	63.00	69.00	73.00	76.00	
	X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP	Perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada Laporan Hasil Evaluasi yang disusun oleh APIP dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah yang dievaluasi	- Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi - jumlah seluruh perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi dibandingkan jumlah seluruh perangkat daerah X 100	Bagian Organisasi	angka	Bagian Organisasi	NA	100	100	100	100	100	100	
	X.XX.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen yang disusun dalam rangka peningkatan kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Dokumen	Bagian Organisasi								
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah dikeluarkan oleh Inspektorat			Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Angka	Inspektorat	72,62	70,3	73	75	77	80	82	
	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketercapaian kinerja pada Sekretariat Daerah	Proporsi ketercapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah	-Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terlaksana - total program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah	Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terlaksana dibandingkan total program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah X 100	Bagian Administrasi Pembangunan	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase ketercapaian anggaran pada Sekretariat Daerah	Proporsi ketercapaian penyerapan anggaran pada Sekretariat Daerah	- Jumlah penyerapan anggaran - pagu total anggaran	Jumlah penyerapan anggaran dibandingkan pagu total anggaran pada Sekretariat Daerah X 100	Bagian Administrasi Pembangunan	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	
	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun dalam rangka penyusunan program pembangunan Daerah	Jumlah realisasi dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah	Jumlah realisasi dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Dokumen	Bagian Administrasi Pembangunan	2	3	2	2	2	2	2	
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keberlanjutan kebijakan																
	Rata-rata Capaian kinerja perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja seluruh perangkat daerah berdasarkan realisasi dokumen perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan	-Jumlah capaian kinerja -I dokumen perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan	Jumlah capaian kinerja seluruh perangkat daerah berdasarkan realisasi dokumen perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan	Sekretaris Daerah	Angka	Bagian Organisasi	7,45	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)		Nilai komposit yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	-Akumulasi capaian kinerja marko, - capaian kinerja urusan pemerintahan - perubahan kinerja makro	Akumulasi capaian kinerja marko, capaian kinerja urusan pemerintahan dan perubahan kinerja makro	Sekretaris Daerah	Angka	Kemendagri	3.66	3.68	3.71	3.76	3.79	3.82	3.85
	Persentase Ketercapaian SPM		Capaian rata-rata kinerja SPM per urusan wajib pelayanan dasar	-Jumlah capaian kinerja SPM - jumlah urusan wajib pelayanan dasar	Jumlah capaian kinerja SPM per urusan wajib pelayanan dasar dibandingkan jumlah urusan wajib pelayanan dasar	Sekretaris Daerah	%	Bagian Pemerintahan	99,71	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ketepatan Sasaran Program Penanganan Kemiskinan		Jumlah sasaran intervensi individu yang sesuai dengan data terpadu/ jumlah sasaran intervensi X 100	-Jumlah sasaran intervensi individu yang sesuai dengan data terpadu - jumlah sasaran intervensi	Jumlah sasaran intervensi individu yang sesuai dengan data terpadu dibandingkan jumlah sasaran intervensi X 100	Sekretaris Daerah	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	N/A	75	78	80	82	84	85
	Program Pemerintahan dan Kesra		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan seluruh produk hasil koordinasi	-Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (Perda, Perbup) - produk hasil koordinasi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan seluruh produk hasil koordinasi	Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	Bagian Hukum	88	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra		Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	-Jumlah nilai capaian kinerja perangkat daerah -jumlah perangkat daerah di bawah koordinasi asisten pemerintahan dan Kesra	jumlah nilai capaian kinerja perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah di bawah koordinasi asisten pemerintahan dan Kesra	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Angka	Bagian Organisasi	83	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
	Persentase propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi		Jumlah propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi dibandingkan dengan jumlah propemperda	-Jumlah propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi - jumlah propemperda	Jumlah propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi dibandingkan dengan jumlah propemperda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	Bagian Hukum	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi		Jumlah propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi dibandingkan dengan jumlah propemperda	-Jumlah propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi -propemperda	Jumlah propemperda yang ditindaklanjuti sampai dengan tahap fasilitasi dibandingkan dengan jumlah propemperda	Asisten Pemerintahan dan Kesra	%	Bagian Hukum	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Ketepatan Sasaran Program Penanganan Kemiskinan di Bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Persentase yang menunjukkan sasaran individu yang diintervensi sesuai dengan data terpadu di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	- Jumlah sasaran intervensi individu yang sesuai dengan data terpadu di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra - Jumlah sasaran intervensi di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah sasaran intervensi individu yang sesuai dengan data terpadu di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra/jumlah sasaran intervensi di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra X 100	Asisten Pemerintahan dan Kesra	%		N/A	75	78	80	82	84	85
	4.01.02.2.01 Administrasi tata pemerintahan		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan seluruh produk hasil koordinasi	-Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (Perda, Perbup) -seluruh produk hasil koordinasi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan seluruh produk hasil koordinasi	Bagian Pemerintahan	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	100	100

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase capaian urusan Pemerintahan daerah pada LPPD yang meningkat		Jumlah capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Pemerintahan Daerah yang meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Jumlah capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Pemerintahan Daerah yang meningkat sebelumnya	Jumlah capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Pemerintahan Daerah yang meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Bagian Pemerintahan	%	Bagian Pemerintahan	59	64	68	72	76	78	80
	Persentase urusan pemerintahan daerah pada LKPJ dengan kategori "tinggi" dan "sangat tinggi"		Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah pada LKPJ dengan kategori "tinggi" dan "sangat tinggi" dibandingkan dengan jumlah seluruh urusan	-Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah pada LKPJ dengan kategori "tinggi" dan "sangat tinggi" -jumlah seluruh urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah pada LKPJ dengan kategori "tinggi" dan "sangat tinggi" dibandingkan dengan jumlah seluruh urusan	Bagian Pemerintahan	%	Bagian Pemerintahan	92,3	93	93,5	94	94,5	95	96
	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	Dokumen	Bagian Pemerintahan	1	1	1	1	1	1	1
	4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	Dokumen	Bagian Pemerintahan	3	3	3	3	3	3	3
	4.01.02.2.01.03 Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	Dokumen	Bagian Pemerintahan	6	6	6	6	6	6	7
	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama daerah		Jumlah kesepakatan MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dibandingkan dengan jumlah kesepakatan	-Jumlah kesepakatan MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) -jumlah kesepakatan	Jumlah kesepakatan MoU yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) dibandingkan dengan jumlah kesepakatan	Bagian Pemerintahan	%	Bagian Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100
	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi kerjasama dalam negeri	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	Dokumen	Bagian Pemerintahan	24	24	24	24	24	24	24
	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)	-Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (Perda, Perbup) - target	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan target	Bagian Kesejahteraan Rakyat	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat		100	100	100	100	100	100
			Jumlah perumusan kebijakan hasil koordinasi pada perangkat daerah dibawah koordinasi Bagian Kesra dibandingkan dengan jumlah koordinasi yang dilakukan	-Jumlah perumusan kebijakan hasil koordinasi pada perangkat daerah dibawah koordinasi Bagian Kesra -jumlah koordinasi yang dilakukan	Jumlah perumusan kebijakan hasil koordinasi pada perangkat daerah dibawah koordinasi Bagian Kesra dibandingkan dengan jumlah koordinasi yang dilakukan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Zakat Nasional		Ukuran komprehensif yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di tingkat nasional, baik dari aspek pengumpulan, penyaluran, tata kelola, maupun dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik (penerima zakat)	-hasil penjumlahan nilai dimensi makro - dimensi mikro	hasil penjumlahan nilai dimensi makro dan mikro dibagi 2	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Angka	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,62	0,65	0,67	0,70	0,72	0,75	0,77

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	Bagian Kesejahteraan Rakyat	NA	5	6	6	7	8	9
4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Desa,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	Bagian Kesejahteraan Rakyat	NA	5	6	6	7	7	8
4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantiblinmas		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantiblinmas	-Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantiblinmas	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	Bagian Kesejahteraan Rakyat	NA	5	6	6	7	7	8
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum		Instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional	- identifikasi dan pemetaan regulasi, -reregulasi -deregulasi aturan - penguatan sistem regulasi nasional	Instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional	Bagian Hukum	Angka	Kementerian Hukum dan HAM	98,08	98,1	98,3	98,5	98,7	98,9	99
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bagian Hukum	%	Bagian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	%	Bagian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Bagian Hukum	Dokumen	Bagian Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase propempera propemperpu di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)		Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan seluruh produk hasil koordinasi	J-umlah rekomendasi hasil koordinasi (Perda, Perbup) - seluruh produk hasil koordinasi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan seluruh produk hasil koordinasi	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	%	Bagian Hukum	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan		Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Angka	Bagian Administrasi Pembangunan	77	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian		Jumlah BLUD dengan opini WTP dibandingkan dengan jumlah BLUD dikali 100%	-Jumlah BLUD dengan opini WTP -jumlah BLUD	Jumlah BLUD dengan opini WTP dibandingkan dengan jumlah BLUD dikali 100%	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	%	Bagian Perekonomian dan SDA	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase BUMD dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		Jumlah BUMD dengan opini WTP dibandingkan dengan jumlah BUMD dikali 100%	-Jumlah BUMD dengan opini WTP -jumlah BUMD	Jumlah BUMD dengan opini WTP dibandingkan dengan jumlah BUMD dikali 100%	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	%	Bagian Perekonomian dan SDA	70.00	70.00	80.00	80.00	90.00	90.00	100.00
	Persentase Ketepatan Sasaran Program Penanganan Kemiskinan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan		Persentase yang menunjukkan sasaran individu yang diintervensi sesuai dengan data terpadu di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	- Jumlah sasaran intervensi individu yang sesuai dengan data terpadu di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Jumlah sasaran intervensi di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah sasaran intervensi individu yang sesuai dengan data terpadu di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan h sasaran intervensi di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan X 100	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	N/A	75	78	80	82	84	85
	4.01.03.2.01 Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Return of Assets Badan Usaha Milik Daerah (ROA BUMD)	rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya			Bagian Perekonomian dan SDA	%	BPS	1.89	2.17	2.46	2.74	03.03	3.31	3.60
	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	-Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	Bagian Perekonomian dan SDA	Dokumen	Bagian Perekonomian dan SDA	25	25	25	25	25	25	25
	4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian dan SDA	Laporan	Bagian Perekonomian dan SDA	15	15	15	15	15	15	15
	4.01.03.2.02 Pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Realisasi Kinerja Triwulanan Kategori "sangat tinggi"	Jumlah Perangkat Daerah dengan Capaian Realisasi Kinerja Triwulanan Kategori "sangat tinggi" dibandingkan jumlah seluruh perangkat daerah	-Jumlah Perangkat Daerah dengan Capaian Realisasi Kinerja Triwulanan Kategori "sangat tinggi" -jumlah seluruh perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan Capaian Realisasi Kinerja Triwulanan Kategori "sangat tinggi" dibandingkan jumlah seluruh perangkat daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	%	Bagian Administrasi Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
	4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Laporan	Bagian Administrasi Pembangunan	10	10	10	10	10	10	10
	4.01.03.2.02.03 Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan	Laporan	Bagian Administrasi Pembangunan	15	15	15	15	15	15	15
	4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan SDA	Persentase Kebijakan yang Tertangani	Jumlah Kebijakan SDA yang Ditangani per Jumlah Kebijakan SDA yang Diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan	-Jumlah Kebijakan SDA yang Ditangani - Jumlah Kebijakan SDA yang Diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kebijakan SDA yang Ditangani per Jumlah Kebijakan SDA yang Diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan	Bagian Perekonomian dan SDA	%	Bagian Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data <i>supply</i> dan <i>demand</i>		Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data <i>supply</i> dan <i>demand</i>	Bagian Perekonomian dan SDA	angka	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	4,72	4,76	4,78	4,8	4,82	4,84	4,85

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Bagian Perekonomian dan SDA	Dokumen	Bagian Perekonomian dan SDA	25	25	25	25	25	25	25
4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Bagian Perekonomian dan SDA	Dokumen	Bagian Perekonomian dan SDA	2	2	2	2	2	2	2
4.01.03.2.04.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Bagian Perekonomian dan SDA	Dokumen	Bagian Perekonomian dan SDA	0	0	4	4	4	4	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase propemperda propemperbup di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)		Persentase jumlah rancangan peraturan daerah atau peraturan bupati yang diusulkan oleh perangkat daerah dan tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau Program Pembentukan Peraturan Bupati (Propemperbup) di bawah koordinasi asisten administrasi umum terhadap total usulan yang diajukan pada tahun berjalan	-Jumlah rekomendasi hasil koordinasi (Perda, Perbup) - seluruh produk hasil koordinasi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup) dibandingkan seluruh produk hasil koordinasi	Asisten Administrasi Umum	%	Bagian HUKUM	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum		Nilai rata-rata capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, yang mencerminkan tingkat pencapaian target kinerja tahunan masing-masing perangkat daerah sesuai perjanjian kinerja.	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah di bawah Koordinasi Asisten Administrasi Umum	Asisten Administrasi Umum	Angka	Bagian Organisasi	64	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase propemperda propemperbup terkait Bagian Organisasi yang ditindaklanjuti melalui produk kebijakan formal (Perda, Perbup)		Persentase jumlah rancangan peraturan daerah atau peraturan bupati yang diusulkan oleh perangkat daerah dan tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau Program Pembentukan Peraturan Bupati (Propemperbup) di bawah koordinasi bagian organisasi terhadap total usulan yang diajukan pada tahun berjalan	-jumlah rancangan peraturan daerah atau peraturan bupati dalam Program (Propemperda) atau (Propemperbup) di bawah koordinasi asisten administrasi umum - total usulan yang diajukan pada tahun berjalan	Persentase jumlah rancangan peraturan daerah atau peraturan bupati yang diusulkan oleh perangkat daerah dan tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau Program Pembentukan Peraturan Bupati (Propemperbup) di bawah koordinasi asisten administrasi umum terhadap total usulan yang diajukan pada tahun berjalan	Bagian Organisasi	%	Bagian Organisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET							
										2025	2026	2027	2028	2029	2030		
X.XX.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah dokumen hasil penyusunan atau pembaruan yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, yang meliputi penataan struktur organisasi, evaluasi kelembagaan, serta analisis jabatan dan beban kerja pada perangkat daerah	-Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Dokumen	Bagian Organisasi	5	5	5	5	5	5	5		
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel																	
	Nilai Kematangan Organisasi Daerah (KOD)		Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana Instansi Pemerintah telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek operasional dan manajemen berdasarkan Permendagri no 99 tahun 2018	Akumulasi Nilai Capaian Kematangan Perangkat Daerah/Jumlah Perangkat Daerah	Akumulasi Nilai Capaian Kematangan Perangkat Daerah/Jumlah Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah	Angka		38,56	39,68	41,3	41,9	42,6	43,25	44,1		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Kematangan Organisasi "tinggi"		Persentase jumlah perangkat daerah yang memperoleh kategori kematangan organisasi "tinggi" berdasarkan hasil penilaian mandiri kematangan organisasi daerah berdasarkan Permendagri No 99 Tahun 2018	-Jumlah Perangkat Daerah dengan Kematangan Organisasi "tinggi" -jumlah seluruh perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan Kematangan Organisasi "tinggi" dibandingkan dengan jumlah seluruh perangkat daerah	Asisten Administrasi Umum	%	Bagian Organisasi	64,10	67,00	70,00	74,00	78,00	82,00	84,00		
	Indeks BerAKHLAK		Ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat internalisasi dan implementasi nilai-nilai dasar (core values) Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perilaku kerja sehari-hari di sebuah instansi pemerintah			Asisten Administrasi Umum	Angka	Bagian Organisasi	76,30	78	80	82	83	84	85		
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki struktur yang sesuai peraturan perundang-undangan		"Persentase jumlah perangkat daerah yang struktur organisasinya telah disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah"	-Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Struktur Sesuai Peraturan Perundangan - Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Memiliki Struktur Sesuai Peraturan Perundangan per Jumlah Seluruh Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	%	Bagian Organisasi	100	100	100	100	100	100	100		
X.XX.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen hasil penyusunan atau pembaruan yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, yang meliputi penataan struktur organisasi, evaluasi kelembagaan, serta analisis jabatan dan beban kerja pada perangkat daerah	-Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Dokumen	Bagian Organisasi	5	5	5	5	5	5	5		
Sasaran 4: Meningkatnya transparansi dan partisipasi publik																	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dibagi jumlah OPP	Sekretaris Daerah	Angka	Bagian Organisasi	90,85	91	91,5	92	92,5	93	93,5		
Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan		Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah		Sumber data: LKPP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Angka	LKPP	84,95	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00		
4.01.03.2.03 Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Skor Pemanfaatan Sistem Pengadaan		Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan yang terdiri dari SIRUP, e-Tendering, e-Purchasing, non e-Tendering, dan non e-Purchasing, dan e-Contract		Sumber data: LKPP	Bagian PBJ	Angka	Bagian PBJ	23,35	23,5	24	24,5	25	25,5	26		
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ	Dokumen	Bagian PBJ	4	4	4	4	4	4	4		

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
										4.01.03.2.03.02 Pengelolaan LPSE	Jumlah Dokumen Hasil layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian PBJ	Orang	Bagian PBJ	100	100	100	100	100	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman RI)		Pengawasan Ombudsman RI terhadap mutu penyelenggaraan pelayanan publik serta persepsi maladministrasi			Asisten Administrasi Umum	Angka	Ombudsman RI	96,97	97	97,2	97,4	97,6	97,8	98
	Persentase Unit Kerja dengan Indeks Kepuasan Masyarakat "sangat baik"		Persentase jumlah unit kerja penyelenggara pelayanan publik yang memperoleh hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori "sangat baik", berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan	- Jumlah seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) - Jumlah seluruh OPP dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada kategori "sangat baik"	Jumlah OPP dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada kategori "sangat baik" dibagi dengan seluruh OPP	Asisten Administrasi Umum	%	Bagian Organisasi	78,35	80,04	82,47	85,56	88,66	91,75	93,81
	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah		Hasil partisipasi pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan permohonan	- Jumlah produk layanan permohonan yang diberikan kepada pemohon/pengguna layanan - Jumlah kebutuhan sampel responden SKM berdasarkan data jumlah pengguna layanan - Jumlah responden SKM - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per produk layanan permohonan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per produk layanan dibagi jumlah responden SKM	Asisten Administrasi Umum	Angka	Bagian Organisasi	91,81	92	92,3	92,6	92,9	93,2	93,5
X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	Persentase Rekomendasi Ombudsman yang Ditindaklanjuti		Persentase rekomendasi Ombudsman RI yang telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui tindakan perbaikan pelayanan publik			Bagian Organisasi	%	Ombudsman RI	100	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah dokumen yang disusun dalam rangka fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan fasilitasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Laporan	Bagian Organisasi							
X.XX.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yang dipublikasikan		Jumlah kegiatan pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yang dipublikasikan dalam berbagai media	-Jumlah kegiatan pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yang dipublikasikan dalam berbagai media dibagi jumlah kegiatan kedinasan pimpinan daerah	Jumlah kegiatan pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah) yang dipublikasikan dalam berbagai media dibagi jumlah kegiatan kedinasan pimpinan daerah	Bagian Prokompim	%	Bagian Prokompim	90,73	100	100	100	100	100	100
X.XX.01.2.14.01 Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan atas kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan atas kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	Bagian Prokompim	Laporan	Bagian Prokompim	12	12	12	12	12	12	12

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
X.XX.01.2.14.02 Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan atas kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan atas kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	Bagian Prokompim	Laporan	Bagian Prokompim	12	12	12	12	12	12	12
X.XX.01.2.14.03 Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan atas kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan atas kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah)	Bagian Prokompim	Laporan	Bagian Prokompim	12	12	12	12	12	12	12
X.XX.01.2.02 Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu per Jumlah Administrasi Keuangan yang Harus Dilaporkan dikali 100	-Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu -Jumlah Administrasi Keuangan yang Harus Dilaporkan	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu per Jumlah Administrasi Keuangan yang Harus Dilaporkan dikali 100	Bagian Umum	%	Bagian Umum	98	98	98	98	98	98	98
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bagian Umum	Orang/Bulan	Bagian Umum	142	143	143	143	143	143	143
X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bagian Umum	Dokumen	Bagian Umum	10	10	10	10	10	10	10
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Hukum	Dokumen	Bagian Hukum	12	12	12	12	12	12	12
X.XX.01.2.06 Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum		Jumlah Realisasi Belanja Administrasi Umum per Jumlah Anggaran Belanja Administrasi Umum dikali 100	-Jumlah Realisasi Belanja Administrasi Umum -Jumlah Anggaran Belanja Administrasi Umum	Jumlah Realisasi Belanja Administrasi Umum per Jumlah Anggaran Belanja Administrasi Umum dikali 100	Bagian Umum	%	Bagian Umum	97,51	97,51	97,51	97,51	97,51	97,51	97,51
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	7	7	7	7	7	7	7
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	7	7	7	7	7	7	7
				ATK		Bagian Pemerintahan	Paket	Bagian Pemerintahan	12	12	12	12	12	12	12
				ATK		Bagian Kesra	Paket	Bagian Kesra	5	5	5	5	5	5	5
				ATK, Kertas HVS		Bagian Hukum	Paket	Bagian Hukum	2	2	2	2	2	2	2
				ATK, Cover		Bagian Perekonomian SDA	Paket	Bagian Perekonomian SDA	2	2	2	2	2	2	2
				ATK, ketas cover, bahan cetak		Bagian Adbang	Paket	Bagian Adbang	1	1	1	1	1	1	1
				ATK, Kertas Cover, perabot kantor Tisu		Bagian PBJ	Paket	Bagian PBJ	1	1	1	1	1	1	1
				ATK, Kertas Cover, bahan lainnya, bahan komputer, souvenir, alat bahan kegiatan kantor lainnya		Bagian Prokompim	Paket	Bagian Prokompim	6	7	7	7	7	7	7
				ATK, Kertas Cover, Bahan komputer, Perleengkapan dinas		Bagian Organisasi	Paket	Bagian Organisasi	1	1	1	1	1	1	1
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	4	4	4	4	4	4	4

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET									
										2025	2026	2027	2028	2029	2030				
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	7	7	7	7	7	7	7				
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1				
				Cetak Stopmap Dinas, Amplop Dinas, Fotocopy		Bagian Pemerintahan	Paket	Bagian Pemerintahan	12	12	12	12	12	12	12				
				Cetak Stopmap Dinas, Amplop Dinas, Fotocopy		Bagian Kesra	Paket	Bagian Kesra	1	1	1	1	1	1	1				
				Bahan cetak		Bagian Hukum	Paket	Bagian Hukum	12	12	12	12	12	12	12				
				Bahan cetak, penggandaan		Bagian Perekonomian SDA	Paket	Bagian Perekonomian SDA	2	2	2	2	2	2	2				
				Bahan cetak		Bagian Adbang	Paket	Bagian Adbang	1	1	1	1	1	1	1				
				HVS, Penggandaan		Bagian PBJ	Paket	Bagian PBJ	2	2	2	2	2	2	2				
				Bahan cetak, perlengkapan dinas		Bagian Prokompim	Paket	Bagian Prokompim	2	2	2	2	2	2	2				
X.XX.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bagian Umum	Dokumen	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1				
				Jawa Pos		Bagian Pemerintahan	Dokumen	Bagian Pemerintahan	12	12	12	12	12	12	12				
				Koran SM		Bagian Kesra	Dokumen	Bagian Kesra	1	1	1	1	1	1	1				
				Koran SM, Wonosobo Expres, Buku Peraturan Perundang-Undangan		Bagian Hukum	Dokumen	Bagian Hukum	12	12	12	12	12	12	12				
				Koran SM		Bagian Perekonomian SDA	Dokumen	Bagian Perekonomian SDA	360	360	360	360	360	360	360				
						Bagian Adbang	Dokumen	Bagian Adbang	12	12	0	12	12	12	12				
						Bagian PBJ	Dokumen	Bagian PBJ	12	12	12	12	12	12	12				
				SM, Jawa Pos, Tribun Jateng, Wonosobo Expres, tahun 2025 Mercusuar		Bagian Prokompim	Dokumen	Bagian Prokompim	1460	1460	1472	1460	1460	1460	1460				
X.XX.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Bagian Umum	Dokumen	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1				
				SM, Wonosobo Expres		Bagian Organisasi	Dokumen	Bagian Organisasi	12	12	12	12	12	12	12				
				X.XX.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Laporan	Bagian Umum	24	24	24	24	24	24			
				X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Laporan	Bagian Umum	12	12	12	12	12	12	12
								SPJ Rapat, Perjalanan Dinas,		Bagian Pemerintahan	Laporan	Bagian Pemerintahan	12	12	12	12	12	12	12
								SPJ Rapat, Perjalanan Dinas, Natura		Bagian Kesra	Laporan	Bagian Kesra	12	12	12	12	12	12	12
								SPJ Rapat, Perjalanan Dinas,		Bagian Hukum	Laporan	Bagian Hukum	12	12	12	12	12	12	12
								SPJ Rapat, Perjalanan Dinas,		Bagian Perekonomian SDA	Laporan	Bagian Perekonomian SDA	50	50	50	50	50	50	50

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
				SPJ Rapat, Perjalanan Dinas,		Bagian Adbang	Laporan	Bagian Adbang	12	12	12	12	12	12	12
				SPJ Rapat, Perjalanan Dinas,		Bagian PBJ	Laporan	Bagian PBJ	12	12	12	12	12	12	12
				SPJ Rapat, Perjalanan Dinas, penjor, tenong,		Bagian Prokompim	Laporan	Bagian Prokompim	12	12	12	12	12	12	12
				SPJ Rapat, Natura, Perjalanan Dinas		Bagian Organisasi	Laporan	Bagian Organisasi	12	12	12	12	12	12	12
	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Pengadaan Barang milik daerah	-Jumlah Realisasi Anggaran Pengadaan Barang yang Terealisasi -Jumlah Rencana Anggaran Pengadaan Barang	Jumlah Realisasi Anggaran Pengadaan Barang yang Terealisasi per Jumlah Rencana Anggaran Pengadaan Barang kali 100	Bagian Umum	%	Bagian Umum	100	100	100	100	100	100	100
	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1
				Laptop		Bagian Pemerintahan	Unit	Bagian Pemerintahan	0	1	0	1	1	1	1
				Printer, LCD, LAPTOP		Bagian Kesra	Unit	Bagian Kesra	2	0	2	3	2	2	2
				Laptop, Komputer		Bagian Hukum	Unit	Bagian Hukum	0	0	0	2	2	2	2
						Bagian Perekonomian SDA	Unit	Bagian Perekonomian SDA	0	0	0	0	0	0	0
				Laptop		Bagian Adbang	Unit	Bagian Adbang	1	1	0	1	1	1	1
						Bagian PBJ	Unit	Bagian PBJ	0	0	0	0	0	0	0
				Lenso Tele, HP		Bagian Prokompim	Unit	Bagian Prokompim	3	3	10	0	0	0	0
				Printer		Bagian Organisasi	Unit	Bagian Organisasi	0	0	2	1	1	1	1
	X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum							
	X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum		1	1	1	1	1	1
	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum		2	1	1	1	1	1
	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1
	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Jumlah Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Jumlah Anggaran Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah per Jumlah Anggaran Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kali 100	Bagian Umum	%	Bagian Umum	96,42	96,42	96,42	96,42	96,42	96,42	96,42
	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1
				Meterai		Bagian Kesra	Paket	Bagian Kesra	1	1	1	1	1	1	1
				Meterai		Bagian Hukum	Paket	Bagian Hukum	1	1	1	1	1	1	1
						Bagian Perekonomian SDA	Paket	Bagian Perekonomian SDA	1	1	1	1	1	1	1

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
														Meterai	
				Meterai		Bagian PBJ	Paket	Bagian PBJ	12	12	12	12	12	12	12
				Meterai, pengiriman dokumenn		Bagian Prokompim	laporan	Bagian Prokompim	2	2	2	2	2	2	2
				Meterai		Bagian Organisasi	Paket	Bagian Organisasi	1	1	1	1	1	1	1
	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	12	12	12	12	12	12	12
	X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1
	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bagian Organisasi	Laporan	Bagian Organisasi	12	12	12	12	12	12	12
				Langganan Canva, Capcup, Geogle One		Bagian Organisasi	Laporan	Bagian Organisasi	12	12	12	12	12	12	12
				Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	1	1	1	1	1	1	1
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Pemerintahan		Bagian Pemerintahan	12	12	12	12	12	12	12
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Kesra	Paket	Bagian Kesra	1	1	1	1	1	1	1
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Hukum		Bagian Hukum	0	0	0	0	0	0	0
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Perekonomian SDA	Paket	Bagian Perekonomian SDA	1	1	1	1	1	1	1
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Adbang	Paket	Bagian Adbang	12	12	12	12	12	12	12
				Honor Pengelola keuangan		Bagian PBJ	Paket	Bagian PBJ	12	12	12	12	12	12	12
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Prokompim	Paket	Bagian Prokompim	1	1	1	1	1	1	1
				Honor Pengelola keuangan		Bagian Organisasi	Paket	Bagian Organisasi	1	1	1	1	1	1	1
	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Realisasi Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-Jumlah Realisasi Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah -Jumlah Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bagian Umum	%	Bagian Umum	98,68	98,68	98,68	98,68	98,68	98,68	98,68
	X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	16	16	16	16	16	16	16
				1 Mobil, 3 Sepeda motor		Bagian Pemerintahan	Unit		4	4	4	4	4	4	4
				1 Mobil, 4 Sepeda motor		Bagian Hukum	Unit		5	5	5	5	5	5	5
				1 Mobil, 5 Sepeda motor		Bagian PBJ	Unit		5	5	5	5	5	5	5
	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	54	54	54	54	54	54	54
				1 Mobil, 2 Sepeda motor		Bagian Kesra	Unit	Bagian Kesra	3	3	3	3	3	3	3

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
				1 Mobil, 4 Sepeda motor		Bagian Perekonomian SDA	Unit	Bagian Perekonomian SDA	5	5	5	5	5	5	5
				1 Mobil, 4 Sepeda motor		Bagian Adbang	Unit	Bagian Adbang	5	5	5	5	5	5	5
				1 Mobil, 4 Sepeda motor		Bagian Organisasi	Unit	Bagian Organisasi	5	5	5	5	5	5	5
				1 Mobil, 4 Sepeda motor		Bagian Prokompim	Unit	Bagian Prokompim	5	5	5	5	5	5	5
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	221	221	221	221	221	221	221
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	22	22	22	22	22	22	22
				4 Printer, 10 Laptop		Bagian Pemerintahan	Unit	Bagian Pemerintahan	14	14	14	14	14	14	14
				Laptop 6, PC 3, Printer 7		Bagian Kesra	Unit	Bagian Kesra	16	16	16	16	16	16	16
				laptop 3, Pc 5, Proyektor 1. LCD 1, Printer 3, Monitor 5.		Bagian Hukum	Unit	Bagian Hukum	18	18	18	18	18	18	18
				Laptop, Printaer		Bagian Perekonomian SDA	Unit	Bagian Perekonomian SDA	15	15	15	15	15	15	15
				Komputer unit komputer lainnya,		Bagian Adbang	Unit	Bagian Adbang	6	6	6	6	6	6	6
				Komputer		Bagian PBJ	Paket	Bagian PBJ	1	1	1	1	1	1	1
				Komputer, Peralatan studio, Peralatan cetak, alat studio lainnya		Bagian Prokompim	Unit	Bagian Prokompim	27	36	36	36	36	36	36
				Peralatan omputer, peralatan kompter lainnya		Bagian Organisasi	Unit	Bagian Organisasi	9	9	9	9	9	9	9
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	39	39	39	39	39	39	39
X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	18	18	18	18	18	18	18
X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Bagian Umum	Unit	Bagian Umum	40	40	40	40	40	40	40
X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan		Jumlah Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan per Jumlah Pelayanan yang Wajib Dilaksanakan kali 100	-Jumlah Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan -Jumlah Pelayanan yang Wajib Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Kedinasan yang Dilaksanakan per Jumlah Pelayanan yang Wajib Dilaksanakan kali 100	Bagian Umum	%	Bagian Umum	78,16	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2	99,2
X.XX.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan -Kepala Daerah - Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Orang/Bulan	Bagian Umum	2	2	2	2	2	2	2
X.XX.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	2	2	2	2	2	2	2
X.XX.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Orang	Bagian Umum	2	2	2	2	2	2	2

LOGFRAME SEKRETARIAT DAERAH

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	VARIABEL PENYUSUN	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SATUAN	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	TARGET					
										2025	2026	2027	2028	2029	2030
	X.XX.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Orang/Bulan	Bagian Umum	2	2	2	2	2	2	2
	X.XX.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah per Target	-Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -Target	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah per Target	Bagian Umum	%	Bagian Umum	100	100	100	100	100	100	100
	X.XX.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	8	8	8	8	8	8	8
	X.XX.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	7	7	8	8	8	8	8
	X.XX.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Bagian Umum	Paket	Bagian Umum	5	5	5	5	5	5	5

- Keterangan
- Sasaran
 - Program
 - Kegiatan
 - Sub Kegiatan

